



UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MODUL AJAR · BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION

Perilaku Politik

Kode 3PBIP304 · 3 sks · Semester 5
Kurikulum 2023

Penyusun
Purwanto, S.IP., M.Si.

IDENTITAS MODUL

Judul Modul	Modul Ajar Perilaku Politik
Mata Kuliah	Perilaku Politik
Kode Mata Kuliah	3PBIP304
Rumpun Mata Kuliah	MKPP
Bobot	3 sks (Teori = 3, Praktik = 0)
Semester	5 (lima)
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada
Program Studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo
Kurikulum	Kurikulum 2023 berbasis Outcome-Based Education (OBE)
Dokumen Acuan	RPS-3PBIP304 Perilaku Politik
Penyusun	Purwanto, S.IP., M.Si. (NIDN 0926096601)
Penelaah	
Versi / Tahun	1.0 / 2023

Hak Penggunaan

Modul ini merupakan bahan ajar internal Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Ichsan Gorontalo. Penggandaan untuk kepentingan perkuliahan diperkenankan dengan tetap mencantumkan sumber.

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Ajar **Perilaku Politik** (3PBIP304) telah ditelaah dan disahkan sebagai bahan ajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.

Disusun oleh, Pengembang RPS

Ditelaah oleh, Koordinator RMK

Purwanto, S.IP., M.Si.

NIDN. 0926096601

.....

NIDN.

Disetujui oleh, Ketua Program Studi

Mengetahui, Dekan FISIP

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.

NIDN. 0930048307

.....

NIDN.

Gorontalo, ... 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Ajar **Perilaku Politik** ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai bahan belajar utama bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo pada semester lima, dan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berkode 3PBIP304 dalam Kurikulum 2023 yang dikembangkan dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE).

Pemerintahan tidak digerakkan oleh aturan semata, melainkan oleh perilaku manusia yang menjalankannya. Mengapa dua daerah dengan regulasi yang sama menghasilkan kualitas pelayanan yang berbeda? Mengapa program yang baik di atas kertas mandek di tengah jalan? Jawabannya sering terletak pada perilaku politik: orientasi warga, pola interaksi eksekutif dan legislatif, kepentingan partai dan kelompok, politisasi birokrasi, tarik-menarik anggaran, hingga politik identitas.

Modul ini membawa mahasiswa bergerak bertahap dari pemahaman konsep menuju analisis dan rancangan. Setiap unit diturunkan dari satu Sub-CPMK dan dilengkapi pemantik, uraian materi, studi kasus, aktivitas pembelajaran, latihan, serta umpan balik untuk mengukur penguasaan secara mandiri. Seluruh unit bermuara pada satu proyek semester: Laporan Analisis Kebijakan, *policy brief*, dan presentasi argumentatif atas satu kasus nyata pemerintahan daerah atau desa di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Nilai dasar ICHSA-N Universitas Ichsan Gorontalo, yaitu *Integrity, Creativity, Harmony, Service, Adaptability*, dan *Nationalism*, diintegrasikan sebagai kriteria yang dinilai, bukan sekadar semboyan. Penyusun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Fakultas dan Program Studi serta rekan dosen atas dukungannya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Gorontalo, 2023
Penyusun,

Purwanto, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

Identitas Modul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah	1
1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah	1
1.3 Capaian Pembelajaran	2
1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul	3
1.5 Peta Alur Belajar	5
1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Semester	5
1.7 Sistem Penilaian	7
1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut	8
1.9 Norma Akademik.....	8
BAB II Konsep Dasar Perilaku Politik dan Budaya Politik.....	9
BAB III Sosialisasi Politik dan Orientasi Politik Warga.....	16
BAB IV Perilaku Aktor Eksekutif dan Legislatif	23
BAB V Partai Politik, Kelompok Kepentingan, dan Masyarakat Sipil	30
BAB VI Politisasi Birokrasi dan Politik Anggaran	37
BAB VII Politik Identitas dan Kohesivitas Sosial	45
BAB VIII Kerangka Analisis Kebijakan dan Rekomendasi Strategis	52
BAB IX Laporan Analisis Kebijakan Final dan Presentasi Argumentatif	59
BAB X ASESMEN SUMATIF DAN INTEGRASI PENILAIAN.....	65
10.1 Prinsip Asesmen	65
10.2 Rekonsiliasi Bobot Komponen dan Sub-CPMK	65
10.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS.....	66
10.4 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UAS	68
10.5 Rubrik Penilaian Komponen.....	69
10.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan.....	71
Glosarium.....	72
Daftar Pustaka	74
Lampiran	75
Lampiran 1 Formulir Proposal Kasus.....	75
Lampiran 2 Templat Matriks Aktor	76
Lampiran 3 Templat Lembar Observasi Agen Sosialisasi.....	77
Lampiran 4 Templat Kerangka Analisis Pemangku Kepentingan	78
Lampiran 5 Templat Matriks Evaluasi Politisasi Birokrasi dan Politik Anggaran.....	79
Lampiran 6 Templat Kerangka Analisis Kebijakan dan Matriks Rekomendasi.....	80
Lampiran 7 Templat Policy Brief	81
Lampiran 8 Lembar Konsultasi Kemajuan.....	82
Lampiran 9 Log Kontribusi Individu	83
Lampiran 10 Lembar Peer Review Kelompok Pembahas	84
Lampiran 11 Lembar Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan GenAI.....	85

Lampiran 12 Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul	86
--	----

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini dirancang untuk dipelajari secara bertahap, satu unit untuk setiap Sub-CPMK. Ikuti petunjuk berikut agar proses belajar terarah pada capaian pembelajaran yang ditetapkan.

A. Petunjuk bagi Mahasiswa

1. Pelajari **Bab I** terlebih dahulu untuk memahami capaian pembelajaran, peta alur belajar, proyek semester, sistem penilaian, dan norma akademik.
2. Pelajari unit secara berurutan. Konsep pada unit awal menjadi alat analisis pada unit berikutnya, dan setiap unit menyumbang satu bagian laporan proyek.
3. Di awal setiap unit, baca rumusan **Sub-CPMK** dan **indikator capaian** agar Anda mengetahui kemampuan yang dinilai.
4. Tanggapi **pemantik** sebelum membaca uraian materi, lalu bandingkan jawaban awal Anda dengan pemahaman setelah belajar.
5. Kerjakan **aktivitas pembelajaran** sesuai petunjuk, baik yang berlangsung di kelas (luring) maupun melalui LMS (daring).
6. Kerjakan **latihan** secara jujur tanpa melihat kunci, lalu hitung tingkat penguasaan Anda (Subbab 1.8).
7. Lanjutkan ke unit berikutnya apabila tingkat penguasaan mencapai **70% atau lebih**; jika belum, kerjakan tugas remedial.
8. Isi **refleksi diri** di akhir setiap unit dan simpan sebagai bahan Log Kontribusi Individu serta penutup laporan proyek.

B. Petunjuk bagi Dosen Pengampu

1. Gunakan modul ini bersama RPS-3PBIP304 sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan setiap minggu.
2. Sampaikan Sub-CPMK, indikator, dan kriteria penilaian di awal setiap unit agar asesmen berlangsung transparan.
3. Fasilitasi *Case-Based Learning* dan *Project-Based Learning*; dampingi kelompok melalui konsultasi kemajuan wajib pada Minggu 8 dan Minggu 12.
4. Gunakan rubrik pada unit terkait dan Bab X untuk menilai kuis, tugas analisis kasus, laporan, *policy brief*, dan presentasi secara konsisten.
5. Catat nilai per Sub-CPMK di SI-OBE sebagai dasar pengukuran ketercapaian CPMK dan CPL serta perbaikan pembelajaran berkelanjutan.

C. Etika Akademik dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif (GenAI)

Mata kuliah ini menegakkan integritas akademik secara penuh. GenAI boleh dimanfaatkan sebagai asisten belajar dengan ketentuan berikut, sejalan dengan norma akademik pada Subbab 1.9.

- **Diperbolehkan:** eksplorasi konsep, penyusunan kerangka tulisan, pemeriksaan tata bahasa, dan pembangkitan ide awal yang kemudian dikembangkan sendiri.

- **Dilarang:** memakai GenAI saat UTS, UAS, atau kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen; menyerahkan luaran GenAI sebagai karya sendiri; serta mengutip sumber hasil GenAI tanpa verifikasi.
- **Wajib:** menyitasi pemanfaatan GenAI sesuai format yang ditetapkan, memuat alat yang dipakai, bagian yang dibantu, *prompt*, modifikasi mandiri, dan refleksi.
- **Data narasumber:** kerahasiaan data subjek atau narasumber wajib dijaga sesuai UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

D. Penanda dalam Modul

Modul ini menggunakan kotak berwarna untuk membedakan fungsi setiap bagian.

Sub-CPMK & Indikator	Kemampuan akhir yang dituju unit dan bukti capaiannya.
Pemantik	Pertanyaan atau fenomena pembuka untuk mengaktifkan pengetahuan awal.
Studi Kasus	Kasus perilaku politik dan tata kelola di KTI untuk latihan analisis.
Aktivitas	Langkah kerja individu atau kelompok, luring maupun daring.
Latihan & Umpan Balik	Soal atau tugas formatif beserta kunci jawaban atau rubrik.
Refleksi	Pertanyaan untuk merenungkan proses dan capaian belajar.
Nilai ICHSA-N	Penguatan nilai dasar Universitas Ichsan Gorontalo dalam aktivitas.

BAB I

PENDAHULUAN

Orientasi mata kuliah, capaian pembelajaran, alur belajar, sistem penilaian, dan norma akademik

1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah **Perilaku Politik** (3 sks) mengkaji konsep, teori, dan dinamika perilaku aktor-aktor politik, mulai dari orientasi, sosialisasi, dan budaya politik hingga pola perilaku eksekutif, legislatif, partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil, dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, dengan penekanan khusus pada studi kasus Kawasan Timur Indonesia.

Mata kuliah ini berposisi sebagai mata kuliah analisis yang mengintegrasikan pemahaman sistem pemerintahan (CPL-03) dengan kemampuan analisis kebijakan berbasis bukti (CPL-04) dan prinsip manajemen pemerintahan yang akuntabel (CPL-05). Dengan pendekatan *Case-Based Learning* dan *Project-Based Learning* sesuai SN-Dikti dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024, mahasiswa bergerak progresif dari pemahaman konseptual menuju analisis politisasi birokrasi, politik anggaran, dan politik identitas, lalu bermuara pada penyusunan laporan analisis kebijakan yang memuat rekomendasi pengelolaan perilaku politik dalam tata kelola pemerintahan daerah dan desa. Komitmen integritas, antikorupsi, dan kebangsaan (CPL-01) menjadi landasan etis pada setiap tahap analisis.

1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah

Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester lima, ketika mahasiswa telah memiliki bekal tentang sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan metode kajian. Tidak ada mata kuliah prasyarat formal. Kemampuan yang dibangun sangat relevan bagi lulusan yang akan bekerja sebagai analis kebijakan, aparatur pemerintah daerah dan desa, tenaga ahli lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, maupun pegiat masyarakat sipil: mereka perlu membaca perilaku aktor sebelum merancang kebijakan.

Bagi mahasiswa UNISAN, laboratorium analisisnya berada di sekitar mereka. Dinamika pilkada dan pemilihan kepala desa, mutasi pejabat setelah pergantian kepala daerah, tarik-menarik anggaran di DPRD, serta politik identitas dalam kampanye adalah fenomena yang dapat diamati langsung di kabupaten dan kota di Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, dan NTB.

Tabel 1.1 Integrasi nilai ICHSA-N dalam mata kuliah

Nilai	Wujud dalam pembelajaran dan penilaian
Integrity	Kejujuran dalam pengumpulan dan pengutipan data; penerapan prinsip antikorupsi dalam evaluasi politisasi birokrasi dan politik anggaran.
Creativity	Orisinalitas dalam merancang kerangka analisis kebijakan dan rekomendasi strategis.
Harmony	Kolaborasi kelompok lintas daerah asal serta penghargaan terhadap keberagaman perspektif dalam diskusi dan sesi <i>peer review</i> .

Nilai	Wujud dalam pembelajaran dan penilaian
Service	Orientasi rekomendasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat daerah dan desa.
Adaptability	Kesediaan merevisi analisis dan rekomendasi berdasarkan umpan balik dosen dan kelompok pembahas.
Nationalism	Penggunaan perspektif kebhinnekaan dan nilai Pancasila dalam mengevaluasi politik identitas serta menjaga kohesi sosial dalam kerangka NKRI.

1.3 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran disusun berjenjang: CPL Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan menjadi CPMK, lalu dirinci menjadi Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir tiap tahap belajar. Setiap Sub-CPMK menjadi dasar satu unit dalam modul ini.

1.3.1 CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Tabel 1.2 CPL yang dibebankan

Kode	Rumusan CPL
CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.
CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
CPL-04	Mampu menganalisis masalah publik, merumuskan alternatif kebijakan, serta mengevaluasi implementasi dan kinerja kebijakan publik secara berbasis bukti.
CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.

1.3.2 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tabel 1.3 Rumusan CPMK

Kode	Rumusan CPMK
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku politik — meliputi orientasi, partisipasi, sosialisasi, dan budaya politik — serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila, integritas, dan etika dalam kehidupan berpemerintahan di Indonesia.
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis pola perilaku aktor politik — eksekutif, legislatif, partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil — dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah, berdasarkan data empiris dan studi kasus kawasan.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh perilaku politik terhadap kualitas kebijakan publik — termasuk fenomena politisasi birokrasi, politik anggaran, dan politik identitas — dengan menggunakan kerangka analisis berbasis bukti dan prinsip antikorupsi.
CPMK4	Mahasiswa mampu merancang rekomendasi strategis pengelolaan perilaku politik dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel — mencakup aspek manajemen SDM aparatur, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan kolaboratif — yang dituangkan dalam laporan analisis kebijakan berbasis bukti.

1.3.3 Kemampuan Akhir Tiap Tahap Belajar (Sub-CPMK)

Tabel 1.4 Rumusan Sub-CPMK

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Minggu
Sub-CPMK1	Menjelaskan dan membandingkan konsep dasar orientasi, partisipasi, sosialisasi, dan budaya politik serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila dan etika berpemerintahan di Indonesia.	CPMK1	1–2
Sub-CPMK2	Menganalisis proses sosialisasi politik dan pembentukan orientasi politik warga negara melalui agen-agen sosialisasi (keluarga, sekolah, media, partai) dengan studi kasus masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.	CPMK1	3–4
Sub-CPMK3	Menganalisis pola perilaku aktor eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan data empiris dan studi kasus nyata.	CPMK2	5–6
Sub-CPMK4	Menganalisis perilaku partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil dalam arena penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan kerangka analisis berbasis bukti empiris.	CPMK2	7
Sub-CPMK5	Mengevaluasi pengaruh politisasi birokrasi dan politik anggaran terhadap kualitas kebijakan publik menggunakan kerangka analisis berbasis bukti dan prinsip antikorupsi.	CPMK3	9–10
Sub-CPMK6	Mengevaluasi fenomena politik identitas dan pengaruhnya terhadap kohesivitas sosial serta kualitas kebijakan publik dengan menggunakan perspektif integritas dan nilai-nilai kebhinnekaan.	CPMK3	11–12
Sub-CPMK7	Merancang kerangka analisis kebijakan yang mengintegrasikan aspek manajemen SDM aparatur dan pelayanan publik sebagai respons terhadap pola perilaku politik yang teridentifikasi pada pemerintahan daerah/desa di Kawasan Timur Indonesia.	CPMK4	13–14
Sub-CPMK8	Menghasilkan laporan analisis kebijakan final yang memuat rekomendasi strategis pengelolaan perilaku politik untuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif pada konteks pemerintahan daerah/desa di Kawasan Timur Indonesia, dan mempresentasikannya secara argumentatif.	CPMK4	15

1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul

Matriks berikut menunjukkan keselarasan konstruktif antara Sub-CPMK, CPMK, dan CPL. Bobot Sub-CPMK mengikuti tabel Rekonsiliasi Bobot pada RPS, sehingga penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK dan penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian (Tabel 1.10).

Tabel 1.5 Korelasi Sub-CPMK terhadap CPMK

Sub-CPMK	CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4
Sub-CPMK1	√	—	—	—
Sub-CPMK2	√	—	—	—
Sub-CPMK3	—	√	—	—
Sub-CPMK4	—	√	—	—
Sub-CPMK5	—	—	√	—
Sub-CPMK6	—	—	√	—
Sub-CPMK7	—	—	—	√
Sub-CPMK8	—	—	—	√

Tabel 1.6 Korelasi Sub-CPMK terhadap CPL dan bobot (%)

Sub-CPMK	CPL-01	CPL-03	CPL-04	CPL-05	Bobot	Minggu
Sub-CPMK1	8	7	—	—	15	2
Sub-CPMK2	5	4	—	—	9	2
Sub-CPMK3	—	4	4	—	8	2
Sub-CPMK4	—	5	3	—	8	1
Sub-CPMK5	8	—	7	—	15	2
Sub-CPMK6	8	—	7	—	15	2
Sub-CPMK7	—	—	8	7	15	2
Sub-CPMK8	—	—	9	6	15	1
Jumlah	29	20	38	13	100	14

Proporsi tiap CPL dipertahankan dari matriks CPL pada RPS, lalu diskalakan ke bobot Sub-CPMK hasil Rekonsiliasi Bobot agar keduanya konsisten.

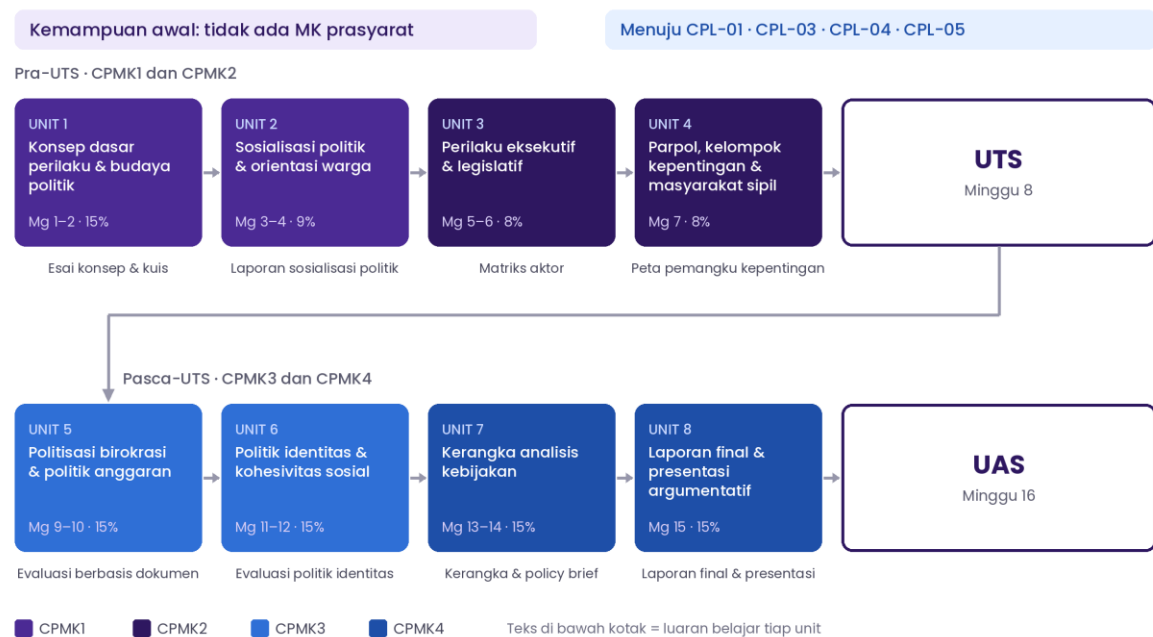
Tabel 1.7 Peta unit modul

Unit	Judul Unit	Sub-CPMK	Minggu	Luaran Belajar
1	Konsep Dasar Perilaku Politik dan Budaya Politik	Sub-CPMK1	1–2	Esai konsep dan kuis
2	Sosialisasi Politik dan Orientasi Politik Warga	Sub-CPMK2	3–4	Laporan sosialisasi politik
3	Perilaku Aktor Eksekutif dan Legislatif	Sub-CPMK3	5–6	Matriks aktor dan analisis kasus
4	Partai Politik, Kelompok Kepentingan, dan Masyarakat Sipil	Sub-CPMK4	7	Kerangka pemangku kepentingan
—	Evaluasi Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK1–4	8	—
5	Politikasi Birokrasi dan Politik Anggaran	Sub-CPMK5	9–10	Evaluasi berbasis dokumen

Unit	Judul Unit	Sub-CPMK	Minggu	Luaran Belajar
6	Politik Identitas dan Kohesivitas Sosial	Sub-CPMK6	11–12	Evaluasi politik identitas
7	Kerangka Analisis Kebijakan dan Rekomendasi Strategis	Sub-CPMK7	13–14	Kerangka kebijakan dan <i>policy brief</i>
8	Laporan Final dan Presentasi Argumentatif	Sub-CPMK8	15	Laporan final dan presentasi
—	Evaluasi Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK5–8	16	—

1.5 Peta Alur Belajar

Pada paruh pertama semester, mahasiswa membangun perangkat konseptual dan kemampuan memetakan aktor: konsep perilaku dan budaya politik, sosialisasi dan orientasi warga, perilaku eksekutif dan legislatif, serta perilaku partai, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil. Pada paruh kedua, perangkat itu dipakai untuk mengevaluasi politisasi birokrasi, politik anggaran, dan politik identitas, lalu dituangkan menjadi kerangka analisis kebijakan, rekomendasi strategis, dan laporan final yang dipresentasikan secara argumentatif.



Gambar 1.1 Peta alur belajar dan luaran tiap unit

1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Semester

1.6.1 Model, Metode, dan Modalitas

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan dua metode utama. *Case-Based Learning* dipakai untuk mengoperasionalkan konsep melalui kasus pemerintahan daerah dan desa di KTJ, sedangkan *Project-Based Learning* dipakai untuk menghasilkan luaran bertahap yang bermuara pada Laporan Analisis Kebijakan. Teknik yang digunakan antara lain diskusi kelompok kecil, simulasi pemetaan pemangku kepentingan, analisis dokumen resmi, debat terstruktur, *peer review*, dan presentasi argumentatif.

Perkuliahan dilaksanakan secara bauran (*blended learning*): sesi luring untuk diskusi, presentasi, dan umpan balik langsung; sesi daring melalui LMS untuk video kuliah, bahan bacaan, forum diskusi asinkron, kuis formatif, pengumpulan tugas, dan konsultasi.

Tabel 1.8 Estimasi beban belajar per minggu (3 sks)

Bentuk Kegiatan	Rincian	Waktu
Kegiatan Belajar Terbimbing (PB)	Tatap muka atau sinkron: 3 × 50 menit	150 menit
Penugasan Terstruktur (PT)	Tugas individu atau kelompok: 3 × 60 menit	180 menit
Kegiatan Mandiri (KM)	Membaca, menelusuri dokumen, refleksi: 3 × 60 menit	180 menit
Jumlah		510 menit

1.6.2 Proyek Semester

Proyek semester berjudul "**Analisis Perilaku Politik dan Perancangan Kerangka Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah/Desa di Kawasan Timur Indonesia**". Mahasiswa bekerja dalam kelompok 4–5 orang yang komposisinya ditetapkan dosen pada Minggu 3 dengan memperhatikan keberagaman daerah asal. Setiap kelompok memilih satu kasus nyata pemerintahan daerah atau desa di KTI, dan kasus antar-kelompok dalam satu kelas tidak boleh sama.

Tabel 1.9 Tahapan dan luaran proyek semester

Minggu	Tahap dan luaran
3–4	Pembentukan kelompok dan penetapan kasus; Proposal Kasus maksimal 3 halaman (justifikasi, pertanyaan analisis, rencana pengumpulan data)
5–6	Pemetaan aktor dan analisis sosialisasi politik; matriks aktor dan narasi sosialisasi (± 1.000 kata)
7–8	Analisis perilaku aktor eksekutif dan legislatif; draf Bab II (± 1.500 kata); konsultasi kemajuan wajib (Minggu 8)
9–10	Analisis partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil; integrasi temuan awal
11–12	Evaluasi politisasi birokrasi, politik anggaran, dan politik identitas; draf Bab III ; konsultasi kemajuan wajib (Minggu 12)
13	Perancangan kerangka analisis kebijakan dan matriks rekomendasi strategis
14	Finalisasi Laporan Analisis Kebijakan (min. 5.000 kata), Policy Brief (maks. 4 halaman), dan slide (maks. 15 slide)
15	Presentasi argumentatif dan sesi <i>peer review</i> antarkelompok
16	Revisi final berdasarkan masukan; pengumpulan versi final beserta Log Kontribusi Individu

Ketentuan proyek

Data wajib bersumber dari dokumen resmi, pemberitaan media kredibel, atau data survei dan wawancara yang dapat diverifikasi. Log Kontribusi Individu menjadi dasar penyesuaian nilai individu hingga $\pm 10\%$ dari nilai kelompok. Konsultasi kemajuan wajib dilakukan minimal dua kali (Minggu 8 dan 12) dan dibuktikan dengan lembar konsultasi bertanda tangan dosen. Keterlambatan dikenai pengurangan 5 poin per hari, dan tidak ada penerimaan dokumen setelah Minggu 16. Penggunaan data atau argumen tanpa sumber (plagiarisme) mengakibatkan diskualifikasi laporan.

1.7 Sistem Penilaian

Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif. Bobot komponen menentukan nilai akhir, sedangkan bobot Sub-CPMK (Tabel 1.6) menentukan ketercapaian CPL. Keduanya merupakan dua cara pandang atas nilai yang sama: penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen, penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK.

Tabel 1.10 Komponen penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur
1	Kuis Konsep	10	Sub-CPMK1
2	Tugas Analisis Kasus	10	Sub-CPMK2, 3, 4
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	20	Sub-CPMK1–4
4	Proyek Analisis Kebijakan	40	Sub-CPMK5–8
5	Ujian Akhir Semester (UAS)	20	Sub-CPMK5–8
	Total	100	

Rincian silang komponen dan Sub-CPMK, termasuk kontribusi tiap komponen dalam satuan persen, disajikan pada Bab X (Tabel 10.1) mengikuti tabel Rekonsiliasi Bobot pada RPS.

Tabel 1.11 Konversi nilai akhir program sarjana

Nilai Akhir (Skala 100)	Huruf	Bobot	Predikat
85,00 – 100,00	A	4,00	Sangat baik
75,00 – 84,99	B	3,00	Baik
65,00 – 74,99	C	2,00	Cukup
50,00 – 64,99	D	1,00	Kurang
0,00 – 49,99	E	0,00	Mengulang

Untuk keperluan OBE, ambang ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK ditetapkan pada skor 70. Nilai per Sub-CPMK dicatat di SI-OBE sebagai dasar evaluasi ketercapaian CPL dan perbaikan pembelajaran.

1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut

Di akhir setiap unit, hitung tingkat penguasaan Anda terhadap latihan dengan rumus berikut.

Rumus tingkat penguasaan

$$\text{Tingkat penguasaan} = (\text{skor yang diperoleh} \div \text{skor maksimum}) \times 100\%$$

Tabel 1.12 Kriteria penguasaan dan tindak lanjut

Tingkat Penguasaan	Kategori	Tindak Lanjut
90% – 100%	Sangat baik	Lanjut ke unit berikutnya; kerjakan kegiatan pengayaan.
80% – 89%	Baik	Lanjut ke unit berikutnya.
70% – 79%	Cukup	Lanjut setelah meninjau bagian yang masih lemah.
< 70%	Kurang	Pelajari ulang unit, kerjakan remedial, dan konsultasikan kepada dosen.

1.9 Norma Akademik

Norma akademik berikut diberlakukan sesuai RPS dan Pedoman Akademik UNISAN.

1. Kehadiran minimal **75%** dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat batas itu dianggap tidak hadir pada sesi tersebut kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan melalui LMS sesuai tenggat; keterlambatan dikenai pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh; plagiarisme, joki, atau pemalsuan data dan karya dikenai sanksi akademik.
5. Pemanfaatan GenAI wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan dan dilarang saat UTS, UAS, atau kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai disenyapkan selama perkuliahan dan dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber atau subjek penelitian dijaga sesuai UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
8. Komunikasi dosen dan mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS atau surel institusi), bukan kanal pribadi.

Refleksi awal

Sebelum memulai Unit 1, tuliskan dalam 3–5 kalimat: peristiwa politik apa di daerah asal Anda yang paling Anda ingat, perilaku aktor mana yang paling menonjol di sana, dan apa dampaknya bagi pelayanan publik? Simpan tulisan ini sebagai bahan penutup laporan proyek Anda.

BAB II · UNIT 1 · MINGGU 1–2

Konsep Dasar Perilaku Politik dan Budaya Politik

Orientasi, partisipasi, sosialisasi, dan tipe budaya politik dalam kerangka etika Pancasila

2.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK1

Menjelaskan dan membandingkan konsep dasar orientasi, partisipasi, sosialisasi, dan budaya politik serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila dan etika pemerintahan di Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian perilaku politik, orientasi politik, partisipasi politik, sosialisasi politik, dan budaya politik secara tepat sesuai definisi para ahli.
- Membedakan tipe-tipe orientasi politik (kognitif, afektif, evaluatif) menurut kerangka Almond dan Verba.
- Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional dalam konteks demokrasi Indonesia.
- Mengaitkan konsep budaya politik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika pemerintahan.
- Mengklasifikasikan tipe budaya politik pada satu fenomena politik lokal disertai argumentasi berbasis teori.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK1	CPL-01 dan CPL-03	15%	2 minggu (1.020 menit)

2.2 Pemantik

Mari memulai

Di sebuah kelurahan, seorang warga rajin datang ke musrenbang dan menuntut laporan penggunaan dana. Tetangganya tahu banyak tentang politik, sering mengomentari berita, tetapi tidak pernah hadir dalam forum apa pun. Tetangga yang lain tidak tahu siapa lurahnya dan merasa "politik itu urusan orang besar".

Ketiganya warga negara yang sama. Apa yang membedakan perilaku politik mereka? Tuliskan dugaan awal Anda dalam 3–4 kalimat.

2.3 Peta Konsep



Gambar 2.1 Peta konsep Unit 1

2.4 Uraian Materi

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perilaku Politik

Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan individu maupun kelompok yang berkaitan dengan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Cakupannya luas: dari perilaku warga biasa (memilih, berunjuk rasa, mengadu) hingga perilaku aktor resmi (kepala daerah, anggota DPRD, birokrat) ketika mengambil keputusan.

Rush dan Althoff (1997) menempatkan kajian ini dalam sosiologi politik, yaitu hubungan timbal balik antara masyarakat dan politik. Lane (1959) mengajukan pertanyaan yang sampai kini menjadi inti kajian: mengapa orang terlibat, atau justru menjauh, dari politik? Budiardjo (2008) mengingatkan bahwa perilaku politik selalu berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan alokasi nilai dalam masyarakat.

Dalam mata kuliah ini, perilaku politik dianalisis pada dua sisi yang saling memengaruhi: **sisi warga** (orientasi, sosialisasi, partisipasi) dan **sisi aktor pemerintahan** (eksekutif, legislatif, partai, kelompok kepentingan, masyarakat sipil). Unit 1 dan 2 memusatkan perhatian pada sisi warga; Unit 3 dan 4 beralih ke sisi aktor.

2.4.2 Orientasi Politik

Almond dan Verba (1963) menjelaskan bahwa sikap warga terhadap politik terbentuk dari tiga dimensi orientasi. Ketiganya diarahkan pada objek-objek politik: sistem politik secara umum, proses masukan (pemilu, partai, kelompok kepentingan), proses keluaran (kebijakan, birokrasi, peradilan), dan diri sendiri sebagai peserta politik.

Tabel 2.1 Tiga dimensi orientasi politik

Dimensi	Isi	Contoh pernyataan warga
Kognitif	Pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik, peran, dan pejabatnya	"Saya tahu DPRD berwenang membahas APBD."
Afektif	Perasaan: bangga, percaya, marah, takut, atau acuh terhadap objek politik	"Saya tidak percaya pada partai politik."
Evaluatif	Penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria dan nilai tertentu	"Kebijakan itu tidak adil bagi warga pesisir."

Orientasi yang lengkap bukan jaminan partisipasi. Warga bisa tahu banyak (kognitif kuat) tetapi tidak percaya (afektif negatif) sehingga memilih diam. Sebaliknya, warga dengan pengetahuan terbatas dapat sangat aktif karena dorongan solidaritas komunitas.

2.4.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Bentuknya dibedakan menjadi konvensional (melalui saluran resmi) dan nonkonvensional (di luar saluran resmi, tetapi tidak selalu melanggar hukum).

Tabel 2.2 Bentuk partisipasi politik

Konvensional	Nonkonvensional
Memberikan suara dalam pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa	Petisi daring dan kampanye tagar
Menjadi anggota atau pengurus partai politik	Unjuk rasa dan aksi damai
Menghubungi anggota DPRD, lurah, atau kepala desa	Boikot layanan atau produk
Menghadiri musrenbang, musyawarah desa, dan konsultasi publik	Pembangkangan sipil; dalam bentuk ekstrem, kekerasan politik

Milbrath (1965) menggambarkan partisipasi sebagai piramida: sebagian besar warga berada pada lapis penonton (*spectators*) yang sekadar memilih dan mengikuti berita, sebagian kecil menjadi pelaku aktif (*gladiators*), dan sebagian lain apatis. Norris (2011) menambahkan bahwa menurunnya kepercayaan pada lembaga tidak selalu berarti warga apatis; muncul **warga kritis** yang berpindah ke bentuk partisipasi berbasis isu, termasuk melalui media digital.

2.4.4 Sosialisasi Politik: Pengantar

Sosialisasi politik adalah proses seseorang memperoleh orientasi politiknya melalui keluarga, sekolah, media, partai, dan lingkungan sosial. Proses inilah yang menjelaskan mengapa warga dengan latar berbeda memiliki orientasi berbeda. Mekanisme dan agen sosialisasi dibahas mendalam pada Unit 2.

2.4.5 Budaya Politik dan Tipe-tipenya

Budaya politik adalah pola orientasi politik yang dominan dalam suatu masyarakat. Almond dan Verba membedakan tiga tipe.

Tabel 2.3 Tiga tipe budaya politik

Tipe	Ciri utama	Indikator yang dapat diamati
Parokial (<i>parochial</i>)	Kesadaran terhadap sistem politik nasional sangat terbatas; orientasi tertuju pada lingkungan terdekat	Warga tidak mengenal pejabat atau kebijakan; keputusan diserahkan kepada tokoh setempat
Subjek (<i>subject</i>)	Warga sadar adanya pemerintah dan patuh pada keluaran kebijakan, tetapi merasa tidak dapat memengaruhi masukan	Patuh membayar retribusi dan mengikuti program, tetapi tidak menyampaikan aspirasi
Partisipan (<i>participant</i>)	Warga memandang diri sebagai peserta aktif yang berhak memengaruhi kebijakan	Hadir dan berpendapat di musrenbang, mengadu melalui kanal resmi, memantau anggaran

Dalam kenyataan, ketiga tipe hadir bercampur. Almond dan Verba menyebut campuran yang menopang demokrasi stabil sebagai **budaya kewargaan** (*civic culture*): warga cukup aktif untuk mengontrol, tetapi juga cukup taat agar pemerintahan dapat bekerja.

2.4.6 Budaya Politik Indonesia dan Etika Pancasila

Afan Gaffar (2004) menggambarkan politik Indonesia sebagai masa transisi: lembaga demokrasi terbentuk, tetapi pola lama seperti paternalisme, hubungan patron-klien, dan orientasi kekuasaan yang personal masih kuat. Karena itu, budaya politik Indonesia sering tampak sebagai campuran tipe subjek dan partisipan, dengan kantong-kantong parokial di daerah dengan akses informasi terbatas.

Pancasila memberi ukuran etis bagi budaya politik tersebut. Sila keempat mengarahkan pengambilan keputusan pada musyawarah yang dipimpin hikmat kebijaksanaan, bukan pada transaksi; sila kelima menuntut keadilan dalam alokasi anggaran; sila kedua menolak politik yang merendahkan martabat orang lain. Dalam kerangka CPL-01, inilah dasar etika berpemerintahan yang akan dipakai untuk menilai perilaku aktor pada unit-unit berikutnya.

Cara memakai kerangka ini

Setiap kali menganalisis satu fenomena, tanyakan: (1) siapa pelakunya dan apa bentuk perilakunya; (2) orientasi apa yang tampak (kognitif, afektif, evaluatif); (3) bentuk partisipasi apa yang digunakan; (4) tipe budaya politik apa yang paling menjelaskan pola tersebut; dan (5) bagaimana penilaiannya dari sudut etika Pancasila.

2.5 Studi Kasus

Tiga desa, tiga pola (kasus ilustrasi)

Desa Karya Bakti. Musyawarah desa dihadiri banyak warga; kelompok perempuan dan pemuda mengajukan usulan, dan APBDes ditempel di papan informasi.

Desa Tirta Mulya. Warga rajin mengikuti program pemerintah dan patuh membayar iuran, tetapi usulan selalu datang dari perangkat desa. Ketika ada keluhan, warga memilih diam agar "tidak dianggap melawan".

Desa Bukit Sunyi. Sebagian besar warga tidak mengetahui besaran dana desa, tidak mengenal anggota BPD, dan menyerahkan semua keputusan kepada tokoh adat setempat.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada desa tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Klasifikasikan tipe budaya politik dominan pada setiap desa beserta buktinya.
2. Dimensi orientasi politik mana yang paling lemah di Desa Tirta Mulya dan Bukit Sunyi?
3. Bentuk partisipasi apa yang paling mungkin dikembangkan di setiap desa, dan mengapa?
4. Nilai sila Pancasila mana yang paling menonjol dan mana yang paling perlu diperkuat di ketiga desa?

2.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 1 — Peta konsep perilaku politik

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan peta konsep perilaku politik dan memandu diskusi konseptual lisan yang mengukur ketepatan penggunaan istilah.
- Mahasiswa berdiskusi berpasangan untuk membedakan orientasi, sosialisasi, dan partisipasi politik, lalu memaparkan contoh dari daerah asal masing-masing.

Daring (LMS)

- Simak video kuliah singkat (15–20 menit) tentang peta konsep perilaku politik dan baca bagian pengantar pustaka utama.
- Jawab pertanyaan pemantik di forum LMS: apa perbedaan orientasi, sosialisasi, dan partisipasi politik?

Luaran: Catatan awal (1 halaman) berisi ekspektasi dan pengetahuan awal tentang perilaku politik sebagai dasar refleksi akhir semester.

Minggu 2 — Tipe budaya politik dan kuis

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan perbandingan tiga tipe budaya politik disertai contoh data survei tentang orientasi politik warga Indonesia.
- Diskusi kelompok: mahasiswa mengklasifikasikan tipe budaya politik pada fenomena politik lokal pilihan dan saling menanggapi secara santun (nilai *Harmony*).
- **Kuis tertulis singkat (20 menit):** mengklasifikasikan tipe budaya politik dari deskripsi satu fenomena politik lokal beserta argumentasinya.

Daring (LMS)

- Telaah slide anotasi dan rekaman penjelasan komparatif tiga tipe budaya politik di LMS.
- Kerjakan kuis daring formatif untuk mengecek pemahaman tipe budaya politik.

Luaran: Esai analisis individual yang mengaitkan satu fenomena politik lokal dengan tipe budaya politik dan nilai Pancasila.

2.7 Rangkuman

- Perilaku politik mencakup tindakan warga maupun aktor pemerintahan yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- Orientasi politik memiliki tiga dimensi: kognitif, afektif, dan evaluatif, yang diarahkan pada sistem, masukan, keluaran, dan diri sebagai peserta.
- Partisipasi politik dibedakan menjadi konvensional dan nonkonvensional; warga kritis cenderung berpindah ke partisipasi berbasis isu.
- Budaya politik terdiri atas tipe parokial, subjek, dan partisipan; campuran yang menopang demokrasi disebut budaya kewargaan.
- Budaya politik Indonesia bersifat transisional, dan Pancasila menjadi ukuran etis untuk menilai perilaku politik.

2.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Dimensi orientasi politik yang berisi penilaian berdasarkan kriteria dan nilai tertentu adalah ...
 - A. kognitif
 - B. afektif
 - C. evaluatif
 - D. normatif
2. Warga yang patuh pada kebijakan pemerintah tetapi merasa tidak dapat memengaruhi pembuatan kebijakan mencerminkan budaya politik ...
 - A. parokial
 - B. subjek
 - C. partisipan
 - D. kewargaan
3. Menghadiri musyawarah desa dan menyampaikan usulan termasuk partisipasi ...
 - A. konvensional
 - B. nonkonvensional
 - C. anomik
 - D. simbolis
4. Gagasan bahwa menurunnya kepercayaan pada lembaga dapat melahirkan warga kritis dikemukakan oleh ...
 - A. Almond dan Verba
 - B. Norris
 - C. Lane
 - D. Milbrath
5. Campuran budaya politik yang menopang demokrasi stabil menurut Almond dan Verba disebut ...
 - A. budaya parokial
 - B. budaya subjek
 - C. budaya kewargaan
 - D. budaya transisional

B. Uraian

1. Jelaskan perbedaan orientasi, sosialisasi, dan partisipasi politik, lalu berikan satu contoh masing-masing dari daerah asal Anda.
2. Klasifikasikan tipe budaya politik pada satu fenomena politik lokal yang Anda ketahui, sertakan bukti, dan nilai fenomena tersebut dari sudut etika Pancasila.

2.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 2.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	C	Dimensi evaluatif berisi penilaian terhadap objek politik.
2	B	Budaya politik subjek sadar akan keluaran kebijakan tetapi pasif pada masukan.
3	A	Musyawarah desa adalah saluran resmi, sehingga termasuk partisipasi konvensional.
4	B	Norris (2011) membahas democratic deficit dan critical citizens.
5	C	Almond dan Verba menyebutnya civic culture atau budaya kewargaan.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Ketiga konsep dibedakan dengan tepat (skor maksimal 12).
- Contoh konkret dan relevan (skor maksimal 8).
- Penjelasan runtut dan memakai istilah yang tepat (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Klasifikasi tepat dengan bukti yang jelas (skor maksimal 10).
- Argumentasi berbasis teori Almond dan Verba (skor maksimal 8).
- Penilaian etis merujuk sila Pancasila yang relevan (skor maksimal 7).

2.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Baca ulang Subbab 2.4.2 dan 2.4.5, lalu susun ulang Tabel 2.1 dan 2.3 dengan contoh dari daerah Anda sendiri sebelum mengerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Bandingkan tipe budaya politik di dua desa atau kelurahan yang Anda kenal menggunakan indikator pada Tabel 2.3, lalu tulis catatan 300 kata.

2.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Dari tiga tipe budaya politik, mana yang paling menggambarkan sikap Anda sendiri saat ini?
2. Dimensi orientasi politik mana yang paling ingin Anda kuatkan selama mengikuti mata kuliah ini?
3. Apakah dugaan awal Anda pada pemantik berubah setelah mempelajari unit ini?

NILAI ICHSA-N

Harmony dan Integrity: menghargai keberagaman perspektif tentang politik dalam diskusi kelas, serta menyampaikan pengetahuan awal dan contoh kasus secara jujur dan bersumber.

2.12 Referensi Unit

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Lane, R. E. (1959). *Political Life: Why People Get Involved in Politics*. Free Press.
- Rush, M., & Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Milbrath, L. W. (1965). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Rand McNally. (bacaan pengayaan)

BAB III · UNIT 2 · MINGGU 3–4

Sosialisasi Politik dan Orientasi Politik Warga

Agen sosialisasi, mekanisme internalisasi, dan variasi pola sosialisasi di Kawasan Timur Indonesia

3.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK2

Menganalisis proses sosialisasi politik dan pembentukan orientasi politik warga negara melalui agen-agen sosialisasi (keluarga, sekolah, media, partai) dengan studi kasus masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menjelaskan mekanisme dan tahapan proses sosialisasi politik (sosialisasi primer dan sekunder) menggunakan kerangka teoretis yang tepat.
- Mengidentifikasi peran masing-masing agen sosialisasi politik (keluarga, sekolah, media massa, dan partai politik) dalam membentuk orientasi politik warga.
- Menganalisis faktor-faktor yang membedakan pola sosialisasi politik masyarakat perkotaan dan pedesaan di Kawasan Timur Indonesia.
- Mengaitkan nilai integritas dalam proses sosialisasi politik yang sehat dengan pembentukan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK1	CPL-01 dan CPL-03	9%	2 minggu (1.020 menit)

3.2 Pemantik

Mari memulai

Tanyakan pada diri sendiri: dari siapa Anda pertama kali mendengar tentang pemilu? Siapa yang paling memengaruhi cara Anda menilai pemerintah hari ini: orang tua, guru, media sosial, tokoh agama, atau teman?

Jika jawaban Anda berbeda dengan teman sebangku, apa yang menyebabkan perbedaan itu?

3.3 Peta Konsep



Gambar 3.1 Peta konsep Unit 2

3.4 Uraian Materi

3.4.1 Pengertian dan Tahapan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses seseorang mempelajari dan menginternalisasi nilai, sikap, dan pengetahuan politik yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses ini berlangsung sepanjang hidup dan dibedakan menjadi dua tahap. **Sosialisasi primer** terjadi pada masa kanak-kanak, terutama dalam keluarga, dan membentuk sikap dasar terhadap otoritas. **Sosialisasi sekunder** berlangsung ketika seseorang memasuki lingkungan yang lebih luas: sekolah, kelompok sebaya, media, tempat kerja, organisasi, dan partai politik.

Rush dan Althoff (1997) menjelaskan bahwa internalisasi terjadi melalui beberapa mekanisme: **imitasi** (meniru perilaku orang yang dianggap penting), **instruksi** (pengajaran formal maupun informal), dan **motivasi** (dorongan pengalaman dan kepentingan diri). Sosialisasi dapat bersifat **manifest**, yaitu penyampaian pesan politik secara terbuka, atau **laten**, yaitu ketika pola relasi non-politik, misalnya cara keluarga mengambil keputusan, membentuk sikap politik tanpa disadari.

3.4.2 Agen-Agen Sosialisasi Politik

Tabel 3.1 Agen sosialisasi politik dan perannya

Agen	Peran utama	Mekanisme dominan	Contoh pengaruh
Keluarga	Membentuk sikap dasar terhadap otoritas dan kepercayaan	Imitasi dan sosialisasi laten	Pilihan politik yang mengikuti orang tua atau keluarga besar
Sekolah dan kampus	Menanamkan pengetahuan kewargaan dan keterampilan berorganisasi	Instruksi	Pemahaman tentang Pancasila, pemilu, dan hak warga
Media massa dan media sosial	Menyediakan informasi dan membentuk agenda perhatian	Instruksi dan motivasi	Penilaian terhadap kinerja kepala daerah berdasarkan pemberitaan
Partai politik	Merekrut, memobilisasi, dan menanamkan loyalitas	Motivasi dan instruksi	Keterlibatan dalam kegiatan kampanye dan kaderisasi
Kelompok sebaya	Menguatkan atau mengoreksi sikap yang telah terbentuk	Imitasi	Ikut aksi atau diskusi karena pengaruh lingkaran pertemanan

Agen	Peran utama	Mekanisme dominan	Contoh pengaruh
Tokoh agama dan adat	Memberi legitimasi kultural atas pilihan dan sikap politik	Instruksi dan imitasi	Kesediaan mengikuti arahan tokoh dalam musyawarah kampung

3.4.3 Variasi Pola Sosialisasi: Perkotaan dan Pedesaan di KTI

Pola sosialisasi politik tidak seragam. Di kawasan perkotaan, media digital dan organisasi formal cenderung dominan; di pedesaan, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman KTI, keluarga besar, tokoh adat, dan jaringan keagamaan memegang peran lebih besar. Faktor pembeda utamanya adalah akses informasi, tingkat pendidikan, kepadatan organisasi masyarakat sipil, serta kuatnya ikatan kekerabatan.

Tabel 3.2 Perbandingan pola sosialisasi politik

Faktor	Perkotaan	Pedesaan dan kepulauan KTI
Akses informasi	Internet dan media arus utama relatif mudah diakses	Sinyal terbatas; informasi menyebar lewat tutur dan tokoh setempat
Agen dominan	Media sosial, kampus, organisasi profesi	Keluarga besar, tokoh adat, tokoh agama
Bentuk partisipasi	Petisi daring, unjuk rasa, advokasi isu	Musyawarah kampung, gotong royong, mobilisasi kekerabatan
Risiko	Polarisasi dan misinformasi digital	Ketergantungan pada patron dan minimnya informasi pembanding

Hambatan struktural (jarak, biaya transportasi, ketersediaan listrik dan internet) dan hambatan kultural (kesegaran berbeda pendapat dengan tokoh yang dihormati) sama-sama memengaruhi kualitas sosialisasi politik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Akibatnya, warga dapat memiliki dimensi afektif yang kuat terhadap tokoh, tetapi dimensi kognitif dan evaluatif yang lemah terhadap kebijakan.

3.4.4 Sosialisasi Politik dan Warga Negara yang Kritis

Sosialisasi politik yang sehat menghasilkan warga yang mengetahui haknya, mampu menilai kebijakan berdasarkan bukti, dan bersedia berpartisipasi secara santun. Sebaliknya, sosialisasi yang sarat mobilisasi dan imbalan melahirkan partisipasi yang rapuh: tinggi saat pemilu, kosong pada masa antar-pemilu. Di sinilah nilai **Integrity** bekerja: kejujuran informasi yang disampaikan agen sosialisasi menentukan mutu orientasi politik warga. Keluarga, sekolah, media, dan partai yang menyebarkan informasi menyesatkan sama-sama merusak dasar demokrasi lokal.

3.4.5 Metode Memetakan Agen Sosialisasi

Pemetaan agen sosialisasi dilakukan dengan lembar observasi sederhana. Langkahnya: (1) tentukan komunitas atau kasus; (2) daftar agen yang aktif; (3) identifikasi pesan politik yang disampaikan tiap agen; (4) catat mekanisme dan buktinya; (5) nilai pengaruhnya terhadap dimensi orientasi warga; dan (6) simpulkan agen mana yang paling menentukan.

Tabel 3.3 Format lembar observasi agen sosialisasi

Agen	Pesan politik yang disampaikan	Mekanisme	Bukti dan sumber	Pengaruh pada orientasi
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Etika pengumpulan data

Bila melakukan wawancara atau menyebar kuesioner, jelaskan tujuan kajian, mintakan kesediaan narasumber, dan samarkan identitas dalam laporan. Kerahasiaan data narasumber wajib dijaga sesuai UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan norma akademik pada Subbab 1.9.

3.5 Studi Kasus**Dua kampung di Kabupaten Teluk Cendana (kasus ilustrasi)**

Kampung Baru (dekat ibu kota kabupaten). Menjelang pilkada, perbincangan politik warga banyak dipicu unggahan media sosial. Kelompok pemuda mengadakan diskusi terbuka dan memeriksa rekam jejak calon melalui pemberitaan.

Kampung Air Mata (pulau, tiga jam perjalanan laut). Informasi tentang calon hampir seluruhnya datang dari kunjungan tim kampanye dan penjelasan tokoh adat. Warga mengaku memilih "sesuai arahan keluarga besar" dan tidak mengetahui program calon.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Isi lembar observasi (Tabel 3.3) untuk kedua kampung.
2. Agen sosialisasi mana yang dominan di masing-masing kampung, dan mengapa?
3. Dimensi orientasi politik mana yang paling lemah di Kampung Air Mata? Bagaimana cara memperkuatnya?
4. Rumuskan dua rekomendasi penguatan agen sosialisasi yang kontekstual bagi kabupaten tersebut.

3.6 Aktivitas Pembelajaran**Minggu 3 — Memetakan agen sosialisasi****Luring (kelas)**

- Dosen memaparkan proses sosialisasi politik dan infografis perbandingan agen sosialisasi, lalu memandu diskusi kelompok kecil.
- Mahasiswa menghubungkan pengalaman sosialisasi politik pribadinya dengan konsep teoretis secara terbuka dan jujur (nilai *Integrity*).

Daring (LMS)

- Simak video penjelasan proses sosialisasi politik dan jawab pertanyaan reflektif di forum LMS.
- Baca bagian relevan pustaka utama tentang sosialisasi politik.

Luaran: Lembar kerja pemetaan agen sosialisasi (1–2 halaman) sebagai bahan tugas kelompok Minggu 4.

Minggu 4 — Analisis komparatif dan tes sumatif

Luring (kelas)

- Kelompok mempresentasikan laporan analisis komparatif sosialisasi politik di satu daerah KTI dan merespons pertanyaan kritis.
- Dosen memberi umpan balik berbasis rubrik dan menyintesis pola lintas kelompok.
- **Tes sumatif tertulis (30 menit):** analisis kasus sosialisasi politik di satu daerah KTI, dinilai atas ketajaman identifikasi agen, kualitas analisis komparatif, dan koherensi argumentasi teoretis.

Daring (LMS)

- Selesaikan draf laporan kelompok secara kolaboratif dan unggah untuk mendapat umpan balik pada sesi konsultasi daring.
- Pelajari rubrik penilaian laporan dan panduan presentasi di LMS.

Luaran: Laporan analisis kelompok 1.200–1.500 kata dilengkapi tabel komparasi agen sosialisasi. Luaran ini juga menjadi bahan matriks aktor proyek semester (Minggu 5–6).

3.7 Rangkuman

- Sosialisasi politik berlangsung sepanjang hidup melalui tahap primer (keluarga) dan sekunder (sekolah, media, partai, organisasi).
- Mekanisme internalisasi mencakup imitasi, instruksi, dan motivasi; pesannya dapat manifest maupun laten.
- Agen sosialisasi utama adalah keluarga, sekolah, media, partai, kelompok sebaya, serta tokoh agama dan adat.
- Pola sosialisasi di perkotaan dan pedesaan KTI berbeda karena akses informasi, agen dominan, dan kuatnya ikatan kekerabatan.
- Kejujuran informasi agen sosialisasi menentukan mutu orientasi politik dan kualitas partisipasi warga.

3.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Sosialisasi politik yang berlangsung di lingkungan keluarga pada masa kanak-kanak disebut sosialisasi ...
 - A. primer
 - B. sekunder
 - C. laten
 - D. manifest
2. Ketika cara keluarga mengambil keputusan membentuk sikap politik anak tanpa disadari, hal itu merupakan sosialisasi ...
 - A. manifest
 - B. laten
 - C. instruksional
 - D. anomik

3. Mekanisme sosialisasi politik berupa pengajaran formal tentang hak dan kewajiban warga termasuk ...
 - A. imitasi
 - B. instruksi
 - C. motivasi
 - D. mobilisasi
4. Di wilayah kepulauan KTI dengan akses informasi terbatas, agen sosialisasi yang cenderung paling dominan adalah ...
 - A. media sosial
 - B. organisasi profesi
 - C. keluarga besar dan tokoh adat
 - D. kelompok kepentingan nasional
5. Dalam pengumpulan data wawancara, kerahasiaan identitas narasumber wajib dijaga sesuai ...
 - A. UU 23/2014
 - B. UU 27/2022
 - C. UU 6/2023
 - D. UU 7/2017

B. Uraian

1. Jelaskan mekanisme sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff, lalu tunjukkan bagaimana ketiga mekanisme itu bekerja pada satu agen sosialisasi di daerah Anda.
2. Bandingkan pola sosialisasi politik masyarakat perkotaan dan pedesaan di KTI menggunakan minimal tiga faktor, lalu rumuskan satu rekomendasi penguatan yang kontekstual.

3.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 3.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	A	Sosialisasi primer terjadi pada masa awal kehidupan, terutama dalam keluarga.
2	B	Sosialisasi laten terjadi melalui pola relasi non-politik.
3	B	Instruksi adalah penyampaian pengetahuan secara terarah.
4	C	Keterbatasan informasi memperkuat peran keluarga besar dan tokoh setempat.
5	B	UU 27/2022 mengatur perlindungan data pribadi.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Ketiga mekanisme dijelaskan dengan tepat (skor maksimal 10).
- Penerapan pada satu agen konkret (skor maksimal 10).
- Penjelasan runtut dan bersumber (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Tiga faktor pembeda dianalisis, bukan hanya disebut (skor maksimal 12).
- Rekomendasi spesifik dan sesuai konteks (skor maksimal 8).
- Argumen didukung data atau contoh (skor maksimal 5).

3.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Lengkapi kembali lembar observasi pada Tabel 3.3 untuk lingkungan tempat tinggal Anda, bandingkan dengan Tabel 3.1, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Wawancarai dua warga dari generasi berbeda (dengan izin dan kerahasiaan identitas) tentang sumber informasi politik mereka, lalu tulis catatan 400 kata tentang pergeseran agen sosialisasi antargenerasi.

3.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Agen sosialisasi mana yang paling memengaruhi orientasi politik Anda, dan mengapa?
2. Adakah informasi politik yang pernah Anda terima dan ternyata tidak benar? Bagaimana Anda menyikapinya?
3. Bagaimana kelompok Anda memastikan data laporan diperoleh secara etis?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Harmony: jujur dalam menyampaikan pengalaman dan data sosialisasi politik, serta menghargai perbedaan latar daerah asal rekan sebagai sumber pemahaman baru.

3.12 Referensi Unit

- Rush, M., & Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

BAB IV · UNIT 3 · MINGGU 5–6

Perilaku Aktor Eksekutif dan Legislatif

Kewenangan, pola interaksi, dan faktor penentu perilaku aktor dalam pengambilan keputusan

4.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK3

Menganalisis pola perilaku aktor eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan data empiris dan studi kasus nyata.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi kewenangan konstitusional aktor eksekutif dan legislatif pada level pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan regulasi yang berlaku.
- Membedakan pola interaksi eksekutif-legislatif dalam proses legislasi dan penganggaran di tingkat nasional maupun daerah.
- Menganalisis dinamika hubungan eksekutif-legislatif pada satu kasus pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan data empiris.
- Menilai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku aktor eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan berdasarkan studi kasus nyata.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK2	CPL-03 dan CPL-04	8%	2 minggu (1.020 menit)

4.2 Pemantik

Mari memulai

Sebuah rancangan perda tentang pelayanan air bersih diajukan pemerintah kabupaten pada Januari. Pembahasannya baru selesai di bulan November, setelah tiga kali tertunda karena rapat tidak kuorum. Pada tahun yang sama, rancangan perda lain tentang penyertaan modal BUMD selesai hanya dalam enam minggu.

Regulasi dan lembaganya sama. Apa yang menjelaskan perbedaan kecepatan itu? Tuliskan tiga kemungkinan penyebab.

4.3 Peta Konsep



Gambar 4.1 Peta konsep Unit 3

4.4 Uraian Materi

4.4.1 Kewenangan Konstitusional Eksekutif dan Legislatif

Analisis perilaku harus dimulai dari kewenangan formal, karena kewenangan menentukan ruang gerak dan insentif aktor. Di tingkat pusat, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di tingkat daerah, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, terakhir UU 6/2023, mengatur kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan DPRD dengan tiga fungsi sejenis: pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan.

Tabel 4.1 Kewenangan pokok eksekutif dan legislatif

Arena	Eksekutif	Legislatif
Legislasi	Mengajukan rancangan undang-undang atau perda; menetapkan bersama	Membahas, mengubah, dan menyetujui rancangan; mengajukan inisiatif
Anggaran	Menyusun rancangan APBN/APBD, KUA-PPAS, dan melaksanakannya	Membahas dan menyetujui KUA-PPAS serta APBN/APBD
Pengawasan	Melaksanakan kebijakan dan melaporkan kinerja	Mengawasi pelaksanaan perda, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah
Kepegawaian	Mengangkat dan memberhentikan pejabat sesuai ketentuan ASN	Mengawasi, tanpa kewenangan mengangkat pejabat

Perbedaan penting antara pusat dan daerah adalah kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah sekaligus tugas sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan umum, sehingga ia bertanggung jawab kepada dua arah: warga daerah dan pemerintah pusat.

4.4.2 Pola Interaksi Eksekutif-Legislatif

Tabel 4.2 Tiga pola interaksi dan indikatornya

Pola	Ciri	Indikator empiris
Konsensual-programatik	Kesepakatan dibangun atas dasar program dan kebutuhan publik	Pembahasan berjalan sesuai jadwal; dokumen KUA-PPAS konsisten dengan RKPD; risalah memuat argumen kebijakan

Pola	Ciri	Indikator empiris
Transaksional	Dukungan ditukar dengan alokasi program, jabatan, atau proyek	Munculnya program sisipan tanpa dasar perencanaan; distribusi kegiatan mengikuti daerah pemilihan; perubahan mendadak pada pagu
Konflikual	Hubungan macet karena perbedaan kepentingan atau rivalitas elektoral	Rapat tidak kuorum berulang; penundaan persetujuan; penggunaan hak interpelasi atau angket

Dalam praktik, ketiga pola dapat muncul bergantian pada satu daerah, tergantung isu dan waktu, misalnya menjelang pilkada. Tugas analis adalah menemukan pola dominan pada kasus tertentu dan menunjukkan buktinya, bukan memberi label tanpa dasar.

4.4.3 Kerangka Teoretis untuk Membaca Perilaku Aktor

Empat kerangka berikut saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku aktor.

- **Sistem politik (Easton, 1965).** Keputusan adalah keluaran dari pengolahan tuntutan dan dukungan. Analis menelusuri tuntutan siapa yang masuk, bagaimana diolah, dan siapa yang diuntungkan keluarannya.
- **Pilihan rasional (Downs, 1957).** Aktor politik bertindak untuk memaksimalkan dukungan pemilih. Keputusan dibaca sebagai kalkulasi untung-rugi elektoral.
- **Institusionalisme baru (March & Olsen, 1989).** Aturan main formal dan informal membentuk apa yang dianggap pantas dilakukan aktor. Tata tertib DPRD, siklus anggaran, dan kebiasaan rapat ikut menjelaskan perilaku.
- **Otonomi negara (Nordlinger, 1981).** Pejabat negara dapat bertindak berdasarkan preferensinya sendiri, tidak semata menuruti tekanan kelompok kuat. Kerangka ini membantu menjelaskan keputusan yang menentang kepentingan elite.

Ostrom (1990) menambahkan satu perspektif penting: aktor dapat membangun aturan bersama untuk mengelola sumber daya publik secara berkelanjutan. Perspektif ini relevan ketika kita menilai apakah interaksi eksekutif-legislatif menghasilkan tata kelola kolaboratif.

4.4.4 Faktor Penentu Perilaku Aktor

Beberapa faktor yang perlu diperiksa dalam setiap kasus: **kepentingan** (elektoral, ekonomi, kelembagaan); **koalisi** pengusung dan komposisi fraksi di DPRD; **tekanan konstituen** dan kelompok kepentingan; **siklus elektoral**, karena perilaku menjelang pilkada berbeda dari awal masa jabatan; **kapasitas teknis** aparatur dalam menyiapkan dokumen kebijakan; serta **pengawasan eksternal** oleh BPK, Ombudsman, aparat penegak hukum, dan media.

4.4.5 Metodologi Analisis Kasus Berbasis Dokumen

Analisis perilaku aktor menuntut bukti, bukan kesan. Gunakan langkah berikut: (1) tentukan satu keputusan atau kebijakan sebagai fokus; (2) susun kronologi dari dokumen resmi; (3) identifikasi aktor dan posisinya pada setiap tahap; (4) cari pola dan bandingkan dengan kerangka teoretis; (5) triangulasi minimal dua sumber independen untuk setiap klaim penting; dan (6) tulis temuan secara faktual dan adil, dengan menyebut dugaan sebagai dugaan.

Tabel 4.3 Sumber dokumen untuk analisis perilaku aktor

Sumber	Data yang dapat diperoleh
Risalah dan dokumen rapat DPRD	Kronologi pembahasan, posisi fraksi, argumen yang dikemukakan
Dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD	Perubahan pagu dan program antartahap perencanaan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Temuan dan rekomendasi atas pengelolaan keuangan daerah
Situs pemerintah daerah dan LPSE	Perda, perkara, struktur organisasi, dan pemenang pengadaan
Pemberitaan media kredibel	Pernyataan aktor dan peristiwa yang tidak tercatat di dokumen resmi
Data KPU dan dokumen pencalonan	Komposisi koalisi pengusung dan peta kekuatan politik

Tabel 4.4 Format matriks aktor (luaran antara proyek, Minggu 5–6)

Aktor	Jabatan/peran	Kewenangan formal	Kepentingan	Posisi pada kasus	Bukti dan sumber
...	...	...	...	Mendukung / menolak / netral	...
...	...	...	...	...	...

4.5 Studi Kasus

Pembahasan APBD Kabupaten Muara Lestari (kasus ilustrasi)

Pemerintah Kabupaten Muara Lestari mengajukan rancangan APBD dengan prioritas perbaikan puskesmas kepulauan sesuai RKPD. Dalam pembahasan, muncul tambahan program bantuan sarana olahraga yang tersebar di enam kecamatan dan tidak tercantum dalam RKPD. Dua fraksi menahan persetujuan sampai program tersebut dimasukkan. Rapat dua kali tidak kuorum, dan persetujuan akhirnya diberikan pada batas waktu, dengan anggaran puskesmas kepulauan berkurang.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tahun berikutnya, sebagian kegiatan sarana olahraga tercatat tidak selesai. Tiga anggota DPRD yang mendorong program itu maju sebagai calon di pilkada berikutnya.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Susun kronologi kasus dan isi matriks aktor menggunakan format Tabel 4.4.
2. Pola interaksi mana yang paling menjelaskan kasus ini? Tunjukkan indikatornya.
3. Analisis kasus ini dengan pendekatan pilihan rasional dan institusionalisme baru. Apa yang dijelaskan masing-masing?
4. Apa dampak pola perilaku tersebut terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan kepulauan?

4.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 5 — Kerangka analisis dan pemetaan aktor

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan kerangka teoretis hubungan eksekutif-legislatif dan memandu diskusi kelompok berbasis bukti.
- Mahasiswa berlatih membaca dokumen anggaran dan risalah rapat untuk menemukan jejak perilaku aktor.

Daring (LMS)

- Simak video kuliah (15–20 menit) tentang kerangka teoretis hubungan eksekutif-legislatif serta tautan regulasi (UU 23/2014 jo. UU 6/2023) di LMS.
- Isi formulir refleksi daring berisi tiga pertanyaan pemahaman dan baca bab terkait dari pustaka.

Luaran: Lembar pemetaan aktor (maksimal 600 kata beserta tabel) yang membandingkan kewenangan dan pola perilaku eksekutif-legislatif di satu daerah KTI.

Minggu 6 — Analisis kasus dan kuis**Luring (kelas)**

- Mahasiswa mempresentasikan temuan analisis kasus dan saling menguji argumen berbasis data.
- Dosen memberi umpan balik atas ketepatan penggunaan konsep dan mutu bukti.
- **Kuis analisis kasus tertulis (individual, 30 menit):** menjawab pertanyaan analitik atas ringkasan satu kasus pengambilan keputusan, dinilai atas ketepatan identifikasi aktor, kejelasan argumen, dan penggunaan konsep teoretis.

Daring (LMS)

- Baca studi kasus yang diunggah dosen beserta panduan analisis data empiris, dan unduh data pendukung (laporan BPK atau dokumen DPRD).
- Susun laporan analisis kasus pengambilan keputusan dan unggah ke LMS.

Luaran: Laporan analisis kasus pengambilan keputusan eksekutif-legislatif; menjadi bahan **draf Bab II** proyek semester (Minggu 7–8).

4.7 Rangkuman

- Analisis perilaku aktor dimulai dari kewenangan formal: legislasi, anggaran, pengawasan, dan kepegawaian.
- Pola interaksi eksekutif-legislatif dapat bersifat konsensual-programatik, transaksional, atau konfliktual, dan harus dibuktikan dengan indikator.
- Kerangka sistem politik, pilihan rasional, institusionalisme baru, dan otonomi negara saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku aktor.
- Faktor penentu perilaku meliputi kepentingan, koalisi, tekanan konstituen, siklus elektoral, kapasitas aparatur, dan pengawasan eksternal.
- Analisis berbasis dokumen menuntut kronologi, triangulasi minimal dua sumber, dan penulisan yang adil.

4.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Fungsi DPRD menurut UU 23/2014 beserta perubahannya meliputi ...
 - A. pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan
 - B. pengangkatan pejabat dan pengawasan
 - C. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
 - D. legislasi dan yudikasi

2. Munculnya program sisipan tanpa dasar perencanaan yang tersebar mengikuti daerah pemilihan merupakan indikator pola interaksi ...
 - A. konsensual-programatik
 - B. transaksional
 - C. konfliktual
 - D. kolaboratif
3. Pendekatan yang membaca keputusan aktor sebagai kalkulasi untung-rugi dukungan pemilih adalah ...
 - A. institusionalisme baru
 - B. pilihan rasional
 - C. otonomi negara
 - D. sistem politik
4. Dokumen yang paling tepat untuk menelusuri perubahan pagu program antartahap perencanaan adalah ...
 - A. risalah rapat DPRD
 - B. RKPD, KUA-PPAS, dan APBD
 - C. putusan pengadilan
 - D. berita media daring
5. Prinsip triangulasi dalam analisis kasus berarti ...
 - A. memakai tiga teori sekaligus
 - B. mendukung setiap klaim penting dengan minimal dua sumber independen
 - C. mewawancarai tiga narasumber
 - D. menulis tiga bab laporan

B. Uraian

1. Bandingkan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam arena anggaran di tingkat daerah, lalu jelaskan bagaimana perbedaan kewenangan itu membentuk pola perilaku kedua aktor.
2. Analisis satu kasus pengambilan keputusan di pemerintahan daerah KTI menggunakan dua kerangka teoretis pada Subbab 4.4.3. Sertakan sumber datanya.

4.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 4.5 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	A	DPRD menjalankan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan.
2	B	Pertukaran dukungan dengan alokasi program adalah ciri pola transaksional.
3	B	Downs (1957) menjelaskan perilaku aktor sebagai maksimalisasi dukungan.
4	B	Rangkaian dokumen perencanaan dan penganggaran memuat perubahan pagu.
5	B	Triangulasi berarti memverifikasi klaim melalui sumber yang berbeda.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Kewenangan kedua aktor dijelaskan dengan tepat merujuk regulasi (skor maksimal 10).
- Hubungan kewenangan dan perilaku dianalisis, bukan hanya dideskripsikan (skor maksimal 10).
- Contoh kasus mendukung argumen (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Kronologi dan aktor diidentifikasi dengan bukti bersumber (skor maksimal 10).
- Dua kerangka diterapkan secara tepat dan dibandingkan (skor maksimal 10).
- Penulisan adil dan menyebut dugaan sebagai dugaan (skor maksimal 5).

4.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang pertanyaan kasus Muara Lestari nomor 1 dan 2 dengan mengikuti langkah pada Subbab 4.4.5, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Telusuri satu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas pemerintah daerah di provinsi Anda dan tulis catatan 400 kata tentang jejak perilaku aktor yang tampak dari temuan tersebut.

4.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Bukti jenis apa yang paling sulit Anda peroleh, dan bagaimana Anda mengatasinya?
2. Apakah Anda pernah tergoda menyimpulkan lebih cepat daripada yang didukung data?
3. Bagaimana kelompok Anda membagi tugas penelusuran dokumen?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Adaptability: mengutip sumber secara jujur, menahan diri dari tuduhan tanpa bukti, serta bersedia mengubah simpulan ketika data baru menunjukkan sebaliknya.

4.12 Referensi Unit

- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- Nordlinger, E. A. (1981). *On the Autonomy of the Democratic State*. Harvard University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

BAB V · UNIT 4 · MINGGU 7

Partai Politik, Kelompok Kepentingan, dan Masyarakat Sipil

Fungsi, tipologi, dan strategi aktor non-pemerintah dalam arena penyelenggaraan pemerintahan

5.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK4

Menganalisis perilaku partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil dalam arena penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan kerangka analisis berbasis bukti empiris.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengklasifikasikan fungsi partai politik, kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat sipil dalam arena penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kerangka analisis berbasis bukti.
- Menganalisis strategi artikulasi dan agregasi kepentingan yang digunakan kelompok kepentingan dan masyarakat sipil dalam memengaruhi kebijakan publik di Indonesia.
- Mengevaluasi kualitas peran masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif-legislatif menggunakan indikator empiris dari kasus pemerintahan daerah.
- Merancang kerangka analisis berbasis bukti untuk menelaah pengaruh partai politik atau kelompok kepentingan terhadap satu keputusan kebijakan nyata di Kawasan Timur Indonesia.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK2	CPL-03 dan CPL-04	8%	1 minggu (510 menit)

5.2 Pemantik

Mari memulai

Sebuah rancangan peraturan daerah tentang penataan pasar ditunda setelah asosiasi pedagang menggelar audiensi, sementara satu perusahaan besar cukup mengirim surat untuk memperoleh pertemuan dengan kepala dinas. Di sisi lain, sebuah LSM menerbitkan kajian yang kemudian dikutip DPRD dalam rapat.

Ketiganya sama-sama memengaruhi kebijakan, tetapi dengan cara dan sumber daya yang berbeda. Apa yang membedakan peluang pengaruh mereka?

5.3 Peta Konsep



Gambar 5.1 Peta konsep Unit 4

5.4 Uraian Materi

5.4.1 Partai Politik: Fungsi dan Tipologi

Budiardjo (2008) menyebut empat fungsi utama partai politik: **sosialisasi politik**, **rekrutmen politik**, **artikulasi dan agregasi kepentingan** (menyalurkan serta menggabungkan tuntutan warga menjadi alternatif kebijakan), serta **pengatur konflik**. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi-fungsi ini paling terlihat pada pencalonan kepala daerah, penempatan kader di DPRD, dan pembentukan koalisi pendukung kebijakan.

Tabel 5.1 Fungsi partai politik dan jejaknya dalam pemerintahan

Fungsi	Wujud di tingkat daerah	Bukti yang dapat ditelusuri
Sosialisasi politik	Pendidikan politik kader dan kampanye program	Materi kampanye, kegiatan partai, pemberitaan
Rekrutmen politik	Pencalonan kepala daerah dan penyusunan daftar calon legislatif	Dokumen pencalonan di KPU, keputusan pengurus partai
Artikulasi dan agregasi kepentingan	Usulan program melalui fraksi dan reses anggota DPRD	Risalah rapat, laporan reses, pokok pikiran DPRD
Pengatur konflik	Mediasi antarkelompok dan kompromi kebijakan	Kesepakatan fraksi, perubahan rancangan kebijakan

Dalam praktik, fungsi partai dapat menyimpang: rekrutmen berubah menjadi transaksi pencalonan, dan agregasi kepentingan menyusut menjadi penyaluran kepentingan penyandang dana. Analisis perlu memeriksa apakah suatu partai menjalankan fungsinya atau justru menjadi saluran kepentingan sempit, dengan bukti yang dapat ditelusuri.

5.4.2 Kelompok Kepentingan: Tipologi dan Strategi

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang berusaha memengaruhi kebijakan tanpa bermaksud menduduki jabatan publik. Almond membedakan empat tipe yang tetap berguna untuk membaca politik lokal.

Tabel 5.2 Tipologi kelompok kepentingan

Tipe	Ciri	Contoh di daerah
Anomik	Muncul spontan, tidak terorganisasi, sering melalui aksi massa	Kerumunan warga yang memblokir jalan karena kerusakan infrastruktur
Nonasosiasional	Berbasis kekerabatan, etnis, atau agama; tidak berbentuk organisasi formal	Jaringan keluarga besar atau marga yang menyalurkan aspirasi kepada pejabat
Institusional	Berada di dalam lembaga formal dan memakai posisinya untuk memengaruhi kebijakan	Asosiasi pejabat, korps birokrasi, atau unit di dalam pemerintahan
Asosiasional	Terorganisasi, memiliki keanggotaan dan tujuan yang jelas	Asosiasi pedagang pasar, kelompok nelayan, kamar dagang, serikat pekerja

Strategi yang dipakai beragam: **lobi dan audiensi** kepada eksekutif atau DPRD, **advokasi berbasis kajian** dengan menyediakan data dan naskah kebijakan, **kampanye media dan opini publik**, **litigasi** melalui pengadilan, **koalisi** dengan kelompok lain, serta dalam kasus tertentu **pendanaan politik** yang berujung pada pemburuan rente. Kekuatan pengaruh sebuah kelompok bergantung pada sumber daya (dana, keahlian, jumlah anggota), akses kepada pembuat keputusan, dan legitimasi publiknya.

5.4.3 Masyarakat Sipil sebagai Penyeimbang

Masyarakat sipil mencakup organisasi warga yang mandiri dari negara dan pasar: LSM, organisasi keagamaan, kelompok adat, organisasi mahasiswa, media komunitas, dan asosiasi warga. Dahl (1989) menekankan bahwa demokrasi memerlukan pluralitas organisasi yang mampu bersuara, sedangkan Huntington (1968) mengingatkan bahwa pelembagaan organisasi politik yang lemah membuat partisipasi mudah berubah menjadi ketidakstabilan.

Kualitas peran masyarakat sipil dapat dinilai dengan indikator empiris, antara lain: keberlanjutan kegiatan (bukan hanya musiman), kemandirian pendanaan, kemampuan menghasilkan kajian atau data, akses ke forum resmi seperti musrenbang dan rapat dengar pendapat, keterwakilan kelompok rentan, serta jejak perubahan kebijakan yang dapat ditunjukkan. Risiko terbesarnya adalah **kooptasi**, ketika organisasi kehilangan kemandirian karena bergantung pada proyek atau dukungan pejabat tertentu.

5.4.4 Kerangka Analisis Pemangku Kepentingan Berbasis Bukti

Kerangka analisis pemangku kepentingan menyatukan seluruh aktor non-pemerintah dan pemerintah dalam satu peta. Langkahnya: (1) tentukan keputusan kebijakan yang dianalisis; (2) daftar aktor beserta tipenya; (3) identifikasi kepentingan, sumber daya, dan strategi masing-masing; (4) nilai tingkat pengaruh dan kepentingan; (5) tunjukkan bukti pengaruh pada setiap tahap keputusan; dan (6) simpulkan aktor mana yang paling menentukan hasil dan mengapa.

Tabel 5.3 Format kerangka analisis pemangku kepentingan

Aktor	Tipe	Kepentingan	Sumber daya	Strategi	Pengaruh (tinggi/sedang/rendah)	Bukti
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Menghindari kesimpulan yang melampaui bukti

Menemukan bahwa sebuah perusahaan berkepentingan atas suatu kebijakan tidak sama dengan membuktikan bahwa perusahaan itu memengaruhi keputusan. Bedakan tiga tingkat klaim: **kepentingan** (dapat ditunjukkan dari dokumen usaha), **akses** (dapat ditunjukkan dari agenda pertemuan atau audiensi), dan **pengaruh** (memerlukan bukti perubahan isi keputusan). Tulis hanya sejauh bukti yang Anda miliki.

Persiapan UTS (Minggu 8)

UTS mencakup Sub-CPMK1–4. Pelajari kembali rangkuman Unit 1–4, kerjakan ulang latihan yang belum tuntas, dan siapkan kemampuan menerapkan konsep pada kasus, karena soal UTS berbentuk analisis kasus. Pada Minggu 8 juga berlangsung **konsultasi kemajuan wajib** proyek semester beserta pengumpulan draf Bab II. Kisi-kisi UTS disajikan pada Bab X.

5.5 Studi Kasus

Rancangan perda penataan pasar Kota Bandar Niaga (kasus ilustrasi)

Pemerintah Kota Bandar Niaga menyusun rancangan perda penataan pasar. Asosiasi pedagang pasar (beranggotakan 1.200 orang) mengajukan audiensi dan menyerahkan usulan tertulis. Sebuah perusahaan pengembang yang berminat membangun pusat perbelanjaan di lokasi yang sama tercatat dua kali bertemu kepala dinas menurut agenda resmi. Sebuah LSM menerbitkan kajian dampak sosial yang kemudian dikutip dalam rapat dengar pendapat DPRD. Sementara itu, sekelompok pedagang kaki lima yang tidak terorganisasi menggelar aksi spontan di depan kantor wali kota. Naskah akhir perda memuat jaminan relokasi bagi pedagang lama, tetapi juga membuka ruang kemitraan dengan pihak ketiga.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Klasifikasikan setiap aktor menurut tipologi pada Tabel 5.2 dan isi kerangka pada Tabel 5.3.
2. Strategi siapa yang paling efektif, dan apa buktinya dalam naskah akhir perda?
3. Nilai kualitas peran masyarakat sipil dalam kasus ini menggunakan minimal tiga indikator empiris.
4. Sejauh mana Anda dapat menyimpulkan adanya pengaruh perusahaan pengembang? Bedakan kepentingan, akses, dan pengaruh.

5.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 7 — Simulasi pemetaan pemangku kepentingan

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan tipologi partai politik, kelompok kepentingan, dan konsep masyarakat sipil dengan contoh peta aktor dari satu kasus daerah KTI.
- Kelompok lintas latar belakang melakukan simulasi pemetaan pemangku kepentingan atas kasus kebijakan pilihannya; dosen berkeliling memberi umpan balik formatif.
- Antarkelompok saling menguji ketepatan identifikasi aktor dan mutu bukti yang dipakai.

Daring (LMS)

- Simak video materi (15 menit) tentang tipologi partai politik dan kelompok kepentingan serta konsep *civil society* dalam demokrasi Indonesia.

- Baca bagian terkait dari pustaka dan siapkan draf peta aktor kelompok sebelum sesi luring.

Luaran: Kerangka analisis pemangku kepentingan untuk kasus kebijakan kelompok: peta aktor, kepentingan, strategi, dan bukti pengaruh; menjadi pondasi tugas besar menuju UTS.

5.7 Rangkuman

- Partai politik menjalankan fungsi sosialisasi, rekrutmen, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta pengaturan konflik; penyimpangan fungsi harus dibuktikan dengan data.
- Kelompok kepentingan dibedakan menjadi anomik, nonasosiasional, institusional, dan asosiasional, dengan strategi mulai dari lobi hingga litigasi.
- Kekuatan pengaruh kelompok bergantung pada sumber daya, akses, dan legitimasi publik.
- Masyarakat sipil menjadi penyeimbang kekuasaan; kualitasnya dinilai dengan indikator empiris, dan risiko terbesarnya adalah kooptasi.
- Kerangka analisis pemangku kepentingan membedakan kepentingan, akses, dan pengaruh agar kesimpulan tidak melampaui bukti.

5.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Fungsi partai politik yang menggabungkan berbagai tuntutan warga menjadi alternatif kebijakan disebut ...
 - A. sosialisasi politik
 - B. rekrutmen politik
 - C. agregasi kepentingan
 - D. pengatur konflik
2. Kerumunan warga yang secara spontan memblokir jalan karena kerusakan infrastruktur termasuk kelompok kepentingan ...
 - A. anomik
 - B. nonasosiasional
 - C. institusional
 - D. asosiasional
3. Jaringan kekerabatan atau marga yang menyalurkan aspirasi kepada pejabat termasuk kelompok kepentingan ...
 - A. anomik
 - B. nonasosiasional
 - C. institusional
 - D. asosiasional
4. Indikator yang paling tepat untuk menilai kemandirian organisasi masyarakat sipil adalah ...
 - A. jumlah pengikut media sosial
 - B. sumber dan pola pendanaannya
 - C. kedekatan dengan kepala daerah
 - D. banyaknya kegiatan seremonial

5. Menunjukkan adanya pertemuan resmi antara pengusaha dan pejabat membuktikan adanya ...
- pengaruh atas keputusan
 - akses kepada pembuat keputusan
 - kooptasi masyarakat sipil
 - pelanggaran hukum

B. Uraian

- Klasifikasikan tiga aktor non-pemerintah pada satu kasus kebijakan daerah KTI menurut tipologi Almond, lalu jelaskan strategi dan sumber daya masing-masing.
- Evaluasi kualitas peran masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan di satu daerah menggunakan minimal tiga indikator empiris, dan jelaskan risiko kooptasi yang mungkin terjadi.

5.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 5.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	C	Agregasi kepentingan menggabungkan tuntutan menjadi alternatif kebijakan.
2	A	Kelompok anomik muncul spontan dan tidak terorganisasi.
3	B	Kelompok nonasosiasional berbasis kekerabatan, etnis, atau agama.
4	B	Kemandirian pendanaan menentukan kemampuan bersikap kritis.
5	B	Pertemuan menunjukkan akses; pengaruh memerlukan bukti perubahan isi keputusan.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Klasifikasi tepat untuk ketiga aktor (skor maksimal 9).
- Strategi dan sumber daya dianalisis dengan bukti (skor maksimal 11).
- Sumber data jelas dan dapat ditelusuri (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Tiga indikator diterapkan dengan bukti (skor maksimal 12).
- Analisis risiko kooptasi logis dan kontekstual (skor maksimal 8).
- Penulisan adil dan bersumber (skor maksimal 5).

5.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Isi ulang Tabel 5.3 untuk kasus Bandar Niaga secara lengkap, perhatikan perbedaan kepentingan-akses-pengaruh, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Telusuri satu kajian atau siaran pers organisasi masyarakat sipil di provinsi Anda yang berhasil dikutip dalam dokumen resmi pemerintah daerah, lalu tulis catatan 300 kata tentang strategi advokasinya.

5.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Aktor mana yang paling sering Anda abaikan dalam pemetaan awal, dan mengapa?
2. Bagaimana Anda memastikan kesimpulan kelompok tidak melampaui bukti yang ada?
3. Apa yang perlu kelompok Anda siapkan untuk konsultasi kemajuan pada Minggu 8?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan **Harmony**: menyusun peta aktor secara jujur tanpa menuduh tanpa bukti, serta berkolaborasi secara adaptif dalam kelompok lintas latar belakang daerah.

5.12 Referensi Unit

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Rush, M., & Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. (bacaan pengayaan)

BAB VI · UNIT 5 · MINGGU 9–10

Politisasi Birokrasi dan Politik Anggaran

Netralitas ASN, arena mutasi jabatan, siklus anggaran daerah, dan titik rawan korupsi

6.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK5

Mengevaluasi pengaruh politisasi birokrasi dan politik anggaran terhadap kualitas kebijakan publik menggunakan kerangka analisis berbasis bukti dan prinsip antikorupsi.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi bentuk-bentuk politisasi birokrasi dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan studi kasus konkret.
- Membedakan indikator netralitas ASN dari praktik keberpihakan politik berdasarkan regulasi yang berlaku.
- Menganalisis mekanisme rekrutmen dan mutasi jabatan ASN sebagai arena politisasi birokrasi menggunakan kerangka analisis sistem politik Easton.
- Menghubungkan lemahnya netralitas ASN dengan penurunan kualitas pelayanan publik di daerah.
- Menganalisis kepentingan aktor dan titik rawan korupsi dalam siklus politik anggaran daerah serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-01 dan CPL-04	15%	2 minggu (1.020 menit)

6.2 Pemantik

Mari memulai

Dua bulan setelah pelantikan kepala daerah baru, 47 pejabat dimutasi dalam satu surat keputusan. Kepala puskesmas kepulauan yang baru delapan bulan bertugas dipindahkan ke bagian umum; penggantinya belum pernah memimpin unit layanan. Pada tahun anggaran yang sama, belanja obat di puskesmas itu turun, sementara belanja perjalanan dinas dinas induk naik.

Apakah rangkaian peristiwa itu kebetulan? Data apa yang Anda butuhkan sebelum menyimpulkan?

6.3 Peta Konsep



Gambar 6.1 Peta konsep Unit 5

6.4 Uraian Materi

6.4.1 Netralitas ASN dalam Kerangka Regulasi

Netralitas adalah asas bahwa aparatur sipil negara tidak berpihak kepada kepentingan partai, kandidat, atau golongan tertentu dalam menjalankan tugasnya. Asas ini ditegaskan dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara, yang sejak UU 20/2023 juga menegaskan **sistem merit**, yaitu pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar politik. Ketentuan disiplin pegawai melarang ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis, misalnya menjadi pengurus partai, berkampanye, atau memakai fasilitas negara untuk kepentingan kandidat.

Pengawasan pelanggaran netralitas dijalankan melalui beberapa jalur: atasan langsung dan pejabat yang berwenang di instansi, inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal, kementerian yang berwenang di bidang aparatur negara beserta badan kepegawaian, serta Bawaslu untuk pelanggaran yang terjadi dalam masa pemilu dan pilkada. Karena itu, dalam analisis kasus, selalu tanyakan: apakah dugaan pelanggaran pernah dilaporkan, kepada siapa, dan bagaimana tindak lanjutnya?

6.4.2 Bentuk-Bentuk Politisasi Birokrasi

Politisasi birokrasi terjadi ketika pertimbangan politik menggantikan pertimbangan kompetensi dan kinerja dalam pengelolaan aparatur. Grindle (2012) menunjukkan bahwa praktik penempatan jabatan berdasarkan kedekatan politik (*patronage*) merupakan gejala yang dijumpai di banyak negara, dan bertahan karena memberi imbalan politik langsung bagi pemegang kekuasaan.

Tabel 6.1 Bentuk politisasi birokrasi dan indikatornya

Bentuk	Penjelasan	Indikator yang dapat ditelusuri
Mutasi balas jasa atau hukuman	Pejabat yang mendukung dipromosikan; yang dianggap berseberangan dipindahkan	Gelombang mutasi tak lama setelah pelantikan; ketidaksesuaian jabatan dengan kompetensi
Jual beli jabatan	Jabatan dipertukarkan dengan uang atau dukungan	Putusan pengadilan, temuan pemeriksaan, laporan pengaduan
Mobilisasi ASN	ASN diarahkan mendukung kandidat tertentu	Laporan pelanggaran netralitas ke Bawaslu, dokumentasi kegiatan kampanye
Penempatan pelaksana tugas berkepanjangan	Jabatan dibiarkan diisi pelaksana tugas agar mudah dikendalikan	Daftar pejabat definitif dan pelaksana tugas; lamanya kekosongan jabatan

Bentuk	Penjelasan	Indikator yang dapat ditelusuri
Pengarahan program dan anggaran	Program diarahkan ke wilayah basis dukungan	Sebaran lokasi kegiatan dibanding data kebutuhan; perubahan pagu

6.4.3 Membaca Politisasi dengan Kerangka Easton

Kerangka sistem politik Easton (1965) membantu menyusun analisis secara runtut. **Input:** tuntutan dan dukungan politik, misalnya permintaan tim pemenangan agar pendukungnya memperoleh jabatan. **Konversi:** proses pengambilan keputusan kepegawaian, termasuk peran panitia seleksi, baperjakat, dan pertimbangan kepala daerah. **Output:** keputusan mutasi, promosi, atau pengangkatan pelaksana tugas. **Umpan balik:** dampaknya pada kinerja layanan, moral pegawai, dan dukungan politik pada periode berikutnya.

Dengan kerangka ini, analisis tidak berhenti pada "ada mutasi", tetapi menjelaskan **rantai sebab-akibat** dari tuntutan politik hingga kualitas layanan yang dirasakan warga.

6.4.4 Siklus Politik Anggaran Daerah

Anggaran adalah keputusan politik yang ditulis dalam angka. Setiap tahap siklusnya merupakan arena tempat kepentingan aktor bertemu.

Tabel 6.2 Siklus anggaran daerah, kepentingan aktor, dan titik rawan

Tahap	Aktor dominan	Kepentingan yang bermain	Titik rawan
Perencanaan (musrenbang, RKPD)	Bappeda, perangkat daerah, warga	Usulan warga versus prioritas pimpinan	Usulan warga hilang tanpa penjelasan
Pembahasan KUA-PPAS	Kepala daerah, TAPD, DPRD	Program pokok pikiran DPRD, prioritas kepala daerah	Program sisipan tanpa dasar perencanaan
Penetapan APBD	Kepala daerah dan DPRD	Kompromi politik dan tenggat penetapan	Pertukaran dukungan dengan alokasi
Pelaksanaan dan pengadaan	Perangkat daerah, penyedia barang/jasa	Kepentingan penyedia dan penyanggah dana politik	Pengaturan tender, penggelembungan harga
Hibah, bansos, dan dana desa	Kepala daerah, penerima, perangkat desa	Pembinaan konstituen	Penyaluran berbasis kedekatan politik
Pertanggungjawaban	Inspektorat, BPK, DPRD	Kepatuhan administratif versus mutu belanja	Temuan tidak ditindaklanjuti

Kajian KPK (2020) tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis risiko korupsi menunjukkan bahwa risiko tertinggi umumnya berada pada tahap perencanaan-penganggaran dan pengadaan barang/jasa, dua tahap yang paling banyak melibatkan diskresi. Prinsip antikorupsi karena itu diterapkan pada dua sisi: memperkuat integritas aktor dan mempersempit ruang diskresi tanpa kontrol.

6.4.5 Dampak pada Kualitas Kebijakan dan Instrumen Akuntabilitas

Politisasi birokrasi dan politik anggaran yang transaksional menurunkan kualitas kebijakan melalui beberapa jalur: kompetensi pelaksana menurun, program tidak sesuai kebutuhan, belanja modal

tergeser oleh belanja yang mudah dicalirkan, dan pegawai kehilangan insentif untuk berkinerja. Yang paling dirugikan adalah warga di wilayah dengan daya tawar politik rendah, termasuk kecamatan kepulauan dan pedalaman.

Tabel 6.3 Instrumen akuntabilitas dan data yang dihasilkan

Instrumen	Data yang dapat dipakai analisis
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Opini laporan keuangan, temuan, dan status tindak lanjut
Inspektorat daerah (APIP)	Hasil pengawasan internal dan rekomendasi perbaikan
Laporan kinerja instansi pemerintah	Target dan capaian indikator program
Ombudsman RI	Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik
Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!	Pola keluhan warga atas layanan
Dokumen anggaran dan LPSE	Perubahan pagu, sebaran kegiatan, pemenang pengadaan

6.4.6 Langkah Evaluasi Berbasis Bukti

Evaluasi dilakukan dalam enam langkah: (1) tetapkan fokus, misalnya satu gelombang mutasi atau satu tahun anggaran; (2) susun kronologi dari dokumen resmi; (3) bandingkan keputusan dengan norma (sistem merit, dokumen perencanaan, standar pelayanan); (4) ukur dampaknya dengan indikator yang tersedia, misalnya capaian program atau keluhan warga; (5) triangulasi setiap klaim penting; dan (6) rumuskan rekomendasi yang menyorot penyebab, bukan gejala. Tulis dugaan sebagai dugaan dan cantumkan sumbernya.

Batas kesimpulan

Korelasi waktu antara pergantian kepala daerah dan gelombang mutasi belum membuktikan pelanggaran hukum. Yang dapat Anda simpulkan secara sah adalah **ketidaksesuaian dengan asas merit** bila terbukti jabatan diisi tanpa uji kompetensi atau tidak sesuai kualifikasi. Tuduhan pidana hanya sah bila ada putusan atau temuan resmi.

6.5 Studi Kasus

Mutasi dan anggaran di Kabupaten Sagu Indah (kasus ilustrasi)

Tiga bulan setelah pelantikan, Bupati Sagu Indah memutasi 52 pejabat. Sembilan kepala puskesmas diganti, tiga di antaranya digantikan pejabat tanpa latar belakang kesehatan. Dokumen seleksi terbuka untuk empat jabatan pimpinan tinggi pratama tidak dapat ditemukan di situs resmi. Dalam APBD tahun berikutnya, kegiatan bantuan sarana untuk enam kecamatan basis dukungan bupati meningkat, sedangkan anggaran operasional puskesmas kepulauan tetap. Laporan hasil pemeriksaan mencatat dua temuan administratif pada belanja hibah. Media lokal memberitakan keluhan warga tentang ketersediaan obat, dan kanal pengaduan daerah mencatat peningkatan keluhan layanan kesehatan.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Identifikasi bentuk politisasi birokrasi yang tampak beserta indikatornya (Tabel 6.1).
2. Susun rantai sebab-akibat kasus ini dengan kerangka Easton, dari input hingga umpan balik.
3. Tahap siklus anggaran mana yang paling rawan dalam kasus ini, dan apa buktinya?
4. Rumuskan dua rekomendasi yang menyorot penyebab, bukan gejala, beserta instrumen akuntabilitas yang dipakai untuk memantaunya.

6.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 9 — Politisasi birokrasi dan netralitas ASN

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan konsep politisasi birokrasi dan netralitas ASN, lalu memandu diskusi kasus mutasi pejabat berbasis kepentingan politik.
- Mahasiswa menyusun rantai sebab-akibat kasus secara berkelompok dengan argumen berbasis bukti dan sikap integritas dalam menilai aktor birokrasi.

Daring (LMS)

- Simak video kuliah (20–25 menit) tentang politisasi birokrasi, netralitas ASN, dan contoh kasus mutasi pejabat di daerah.
- Ikuti forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemantik berbasis kasus nyata.

Luaran: Peta konsep individual (1 halaman A4) yang memetakan rantai sebab-akibat politisasi birokrasi di satu kabupaten/kota KTI, disertai dua sumber data pendukung.

Minggu 10 — Politik anggaran dan ujian tertulis

Luring (kelas)

- Kelompok mempresentasikan laporan analisis politik anggaran; dosen menilai kejelasan penyampaian, kemampuan menjawab pertanyaan, dan keterbukaan terhadap kritik.
- **Ujian tertulis:** menganalisis satu kasus nyata politik anggaran daerah, mencakup identifikasi aktor, mekanisme penyimpangan, dan rekomendasi berbasis bukti.

Daring (LMS)

- Pelajari modul interaktif tentang siklus politik anggaran daerah dan infografis alur kewenangan eksekutif-legislatif dalam APBD.
- Ikuti sesi tanya jawab sinkron singkat (30 menit) untuk klarifikasi konsep sebelum presentasi.

Luaran: Laporan analisis politik anggaran kelompok 1.000–1.500 kata; menjadi bahan **draf Bab III** proyek semester (Minggu 11–12).

6.7 Rangkuman

- Netralitas ASN dan sistem merit adalah norma pembanding untuk menilai keputusan kepegawaian di daerah.
- Politisasi birokrasi muncul dalam bentuk mutasi balas jasa, jual beli jabatan, mobilisasi ASN, pelaksana tugas berkepanjangan, dan pengarahan program.
- Kerangka Easton membantu menyusun rantai sebab-akibat dari tuntutan politik hingga kualitas layanan.
- Setiap tahap siklus anggaran daerah memiliki titik rawan; risiko tertinggi umumnya pada perencanaan-penganggaran dan pengadaan.
- Evaluasi berbasis bukti membandingkan keputusan dengan norma, mengukur dampak, melakukan triangulasi, dan merumuskan rekomendasi yang menyasar penyebab.

6.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar politik disebut ...
 - A. sistem karier tertutup
 - B. sistem merit
 - C. sistem patronase
 - D. sistem senioritas
2. Membiarkan jabatan diisi pelaksana tugas dalam waktu lama agar mudah dikendalikan merupakan bentuk ...
 - A. mobilisasi ASN
 - B. politisasi melalui pengisian jabatan
 - C. jual beli jabatan
 - D. pengarahannya anggaran
3. Dalam kerangka Easton, keputusan mutasi pejabat merupakan ...
 - A. input
 - B. konversi
 - C. output
 - D. umpan balik
4. Tahap siklus anggaran yang paling rawan terhadap munculnya program sisipan tanpa dasar perencanaan adalah ...
 - A. musrenbang
 - B. pembahasan KUA-PPAS
 - C. pelaksanaan kegiatan
 - D. pertanggungjawaban
5. Kesimpulan yang paling sah dari temuan bahwa jabatan diisi tanpa uji kompetensi adalah ...
 - A. telah terjadi tindak pidana korupsi
 - B. terdapat ketidaksesuaian dengan asas merit
 - C. kepala daerah pasti menerima suap
 - D. mutasi tersebut sah sepenuhnya

B. Uraian

1. Analisis satu kasus politisasi birokrasi di daerah KTI menggunakan kerangka Easton, mulai dari input hingga umpan balik, disertai sumber data.
2. Identifikasi dua titik rawan dalam siklus anggaran satu daerah beserta indikatornya, lalu rumuskan rekomendasi berbasis prinsip antikorupsi.

6.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 6.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Sistem merit menjadi asas pengelolaan ASN.
2	B	Penempatan pelaksana tugas berkepanjangan adalah salah satu bentuk politisasi birokrasi.
3	C	Keputusan otoritatif adalah output sistem politik.
4	B	Program sisipan biasanya muncul saat pembahasan KUA-PPAS dan APBD.

No.	Kunci	Pembahasan singkat
5	B	Tanpa putusan atau temuan resmi, kesimpulan yang sah adalah ketidaksesuaian dengan asas merit.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Keempat komponen kerangka diterapkan dengan tepat (skor maksimal 12).
- Bukti bersumber dan ditriangulasi (skor maksimal 8).
- Penulisan adil dan tidak melampaui bukti (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Dua titik rawan tepat dengan indikator (skor maksimal 10).
- Analisis kepentingan aktor jelas (skor maksimal 7).
- Rekomendasi menyasar penyebab dan dapat dipantau (skor maksimal 8).

6.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang pertanyaan kasus Sagu Indah nomor 1 dan 2 dengan Tabel 6.1 dan 6.2, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Bandingkan opini BPK dan capaian indikator layanan kesehatan di satu kabupaten KTI selama tiga tahun, lalu tulis catatan 400 kata tentang kaitannya dengan pengelolaan aparatur.

6.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Data apa yang paling sulit Anda peroleh dalam menelusuri kasus kepegawaian atau anggaran?
2. Bagaimana Anda menjaga diri agar tidak menuduh tanpa bukti?
3. Jika kelak Anda menjadi pejabat daerah, langkah apa yang akan Anda tempuh ketika ditekan untuk memutasi pejabat karena alasan politik?

NILAI ICHSA-N

Integrity: menilai perilaku aktor birokrasi secara jujur, berbasis bukti, dan menolak pembenaran atas praktik koruptif; **Service:** menempatkan kualitas pelayanan bagi warga sebagai ukuran akhir penilaian.

6.12 Referensi Unit

Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.

Grindle, M. S. (2012). *Jobs for the Boys: Patronage and the State in Comparative Perspective*. Harvard University Press.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Risiko Korupsi*. KPK RI.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (bacaan pengayaan)

BAB VII · UNIT 6 · MINGGU 11–12

Politik Identitas dan Kohesivitas Sosial

Tipologi, mekanisme mobilisasi, dan dampak politik identitas pada kualitas kebijakan publik

7.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK6

Mengevaluasi fenomena politik identitas dan pengaruhnya terhadap kohesivitas sosial serta kualitas kebijakan publik dengan menggunakan perspektif integritas dan nilai-nilai kebhinnekaan.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menganalisis konsep politik identitas (etnis, agama, kedaerahan) dan mekanisme pembentukannya dalam konteks masyarakat plural di Kawasan Timur Indonesia.
- Membedakan politik identitas yang bersifat inklusif-konstruktif dari yang eksklusif-destruktif berdasarkan kasus empiris.
- Mengidentifikasi pola mobilisasi identitas dalam kontestasi elektoral daerah menggunakan perspektif budaya politik.
- Mengaitkan dinamika politik identitas dengan potensi ancaman terhadap kohesivitas sosial dan semangat kebhinnekaan.
- Mengevaluasi pengaruh politik identitas terhadap proses dan substansi kebijakan publik serta merumuskan rekomendasi berbasis nilai kebhinnekaan.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-01 dan CPL-04	15%	2 minggu (1.020 menit)

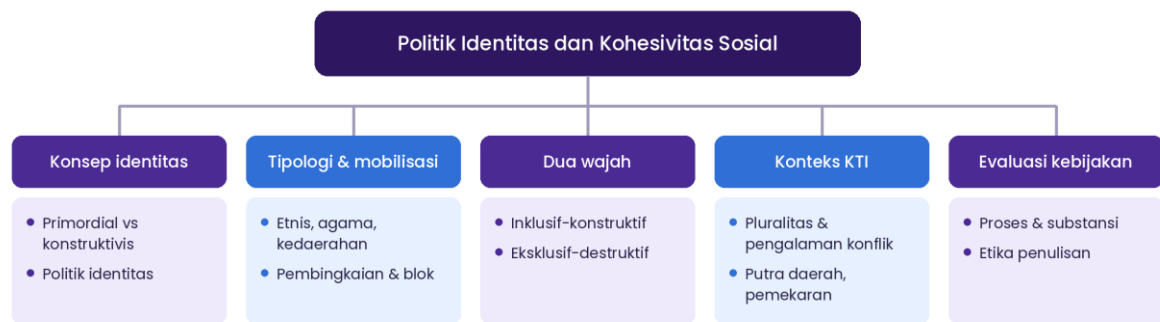
7.2 Pemantik

Mari memulai

Dalam satu pilkada, seorang kandidat berkampanye dengan menekankan asal daerah dan latar keagamaannya, sambil menjanjikan pembangunan rumah ibadah. Kandidat lain menonjolkan komposisi tim yang mewakili semua suku di kabupaten itu dan menjanjikan layanan yang sama bagi semua kampung.

Keduanya memakai identitas. Apakah keduanya sama? Apa yang membedakan penggunaan identitas yang memperkuat dan yang memecah masyarakat?

7.3 Peta Konsep



Gambar 7.1 Peta konsep Unit 6

7.4 Uraian Materi

7.4.1 Identitas dan Politik Identitas

Identitas adalah rasa kebersamaan yang terbentuk dari kesamaan yang dianggap penting: suku, agama, bahasa, adat, atau asal daerah. Dalam kajian politik, identitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang selamanya tetap (pandangan primordial), melainkan sesuatu yang dibentuk dan dipelihara melalui proses sosial (pandangan konstruktivis). Artinya, identitas dapat dikuatkan, digeser, atau justru dipertajam oleh kepentingan politik.

Politik identitas adalah penggunaan kesamaan identitas sebagai dasar mobilisasi dukungan, klaim hak, atau perumusan kebijakan. Penting dicatat bahwa politik identitas tidak otomatis buruk. Tuntutan pengakuan hak masyarakat adat, misalnya, adalah politik identitas yang memperluas keadilan. Yang menjadi masalah adalah ketika identitas dipakai untuk menyingkirkan kelompok lain dari akses layanan dan jabatan publik.

7.4.2 Tipologi dan Mekanisme Mobilisasi

Tabel 7.1 Tipologi politik identitas dan mekanisme mobilisasinya

Basis identitas	Bentuk klaim	Mekanisme mobilisasi yang umum
Etnis dan kekerabatan	Klaim keterwakilan suku atau marga dalam jabatan publik	Jaringan keluarga besar, pertemuan adat, dukungan tokoh marga
Agama	Klaim kesamaan keyakinan sebagai syarat kepemimpinan	Ceramah, jaringan rumah ibadah, organisasi keagamaan
Kedaerahan	Klaim "putra daerah" versus pendatang	Wacana asal-usul dalam kampanye, kriteria rekrutmen lokal
Gabungan	Kombinasi suku, agama, dan asal daerah dalam satu narasi	Penyusunan pasangan calon yang mewakili blok identitas

Mekanisme yang bekerja di baliknya biasanya berupa **pembungkahan** (mengubah isu kebijakan menjadi isu "kita melawan mereka"), **pembentukan blok dukungan** berbasis identitas, dan **penyediaan imbalan selektif** kepada kelompok pendukung. Dari sudut budaya politik (Unit 1), mobilisasi identitas paling mudah berhasil pada masyarakat dengan dimensi kognitif lemah dan afektif kuat: ketika informasi tentang program terbatas, kedekatan identitas menjadi jalan pintas dalam menentukan pilihan.

7.4.3 Inklusif-Konstruktif dan Eksklusif-Destruktif

Tabel 7.2 Membedakan dua wajah politik identitas

Aspek	Inklusif-konstruktif	Eksklusif-destruktif
Tujuan klaim	Memperluas pengakuan dan akses kelompok yang tertinggal	Menguasai akses dan menyingkirkan kelompok lain
Cara berkampanye	Menonjolkan program dan keterwakilan semua kelompok	Menyebarkan stigma dan kecurigaan terhadap kelompok lain
Dampak pada kebijakan	Layanan menjangkau kelompok yang sebelumnya terabaikan	Alokasi anggaran dan jabatan mengikuti garis identitas
Dampak sosial	Kohesi meningkat; keragaman diakui	Polarisasi, ketegangan, hingga potensi konflik
Kesesuaian dengan Pancasila	Sejalan dengan sila kedua, ketiga, dan kelima	Bertentangan dengan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial

7.4.4 Konteks Kawasan Timur Indonesia

KTI adalah kawasan dengan pluralitas yang sangat tinggi: ratusan bahasa, keragaman agama, dan struktur adat yang kuat. Pengalaman konflik sosial pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an di beberapa daerah, antara lain Maluku dan Poso, menunjukkan betapa mahal biaya sosial dari politik yang memecah berdasarkan identitas, sekaligus menunjukkan kapasitas masyarakat untuk berdamai. Modal kultural seperti *pela gandong* di Maluku, falsafah *satu tungku tiga batu* di Fakfak, serta tradisi gotong royong seperti *huyula* di Gorontalo dan *mapalus* di Minahasa terbukti berperan dalam menjaga dan memulihkan kohesi sosial.

Dua isu khas KTI perlu diperhatikan dalam analisis. Pertama, wacana **putra daerah** yang memengaruhi rekrutmen aparatur dan pencalonan kepala daerah. Kedua, dinamika **pemekaran daerah**, yang sering mengandung tuntutan pengakuan identitas sekaligus membuka arena kekuasaan baru. Keduanya dapat bersifat konstruktif maupun destruktif, tergantung apakah tuntutan itu diarahkan pada pemerataan layanan atau pada penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu.

7.4.5 Pengaruh terhadap Kualitas Kebijakan Publik

Politik identitas memengaruhi kebijakan pada dua sisi. Pada **proses**, forum perencanaan dapat didominasi kelompok tertentu sehingga aspirasi kelompok lain hilang. Pada **substansi**, alokasi anggaran, penempatan fasilitas, dan rekrutmen aparatur dapat mengikuti garis identitas, bukan kebutuhan. Akibatnya, muncul ketimpangan layanan antarwilayah dan antarkelompok yang justru menjadi sumber ketegangan baru.

Tabel 7.3 Kerangka evaluasi pengaruh politik identitas pada kebijakan

Dimensi	Pertanyaan evaluasi	Bukti yang dicari
Proses	Siapa yang hadir dan bersuara dalam perencanaan?	Daftar hadir musrenbang, notula, komposisi forum
Substansi	Apakah alokasi mengikuti kebutuhan atau garis identitas?	Data sebaran anggaran dan penerima manfaat dibanding data kebutuhan
Aparatur	Apakah rekrutmen dan promosi mempertimbangkan kompetensi?	Dokumen seleksi, komposisi pejabat, uji kompetensi

Dimensi	Pertanyaan evaluasi	Bukti yang dicari
Kohesi sosial	Apakah muncul ketegangan atau segregasi layanan?	Laporan pengaduan, pemberitaan, hasil kajian setempat
Nilai kebhinnekaan	Apakah kebijakan memperkuat pengakuan keragaman?	Rumusan perda, program lintas kelompok

Etika menganalisis isu identitas

Tulis temuan tentang kelompok identitas dengan sangat hati-hati. Gunakan data, bukan stereotip; hindari generalisasi yang merendahkan suku atau agama tertentu; sebutkan pelaku sebagai individu atau elite tertentu, bukan seluruh kelompok; dan pertimbangkan dampak tulisan Anda terhadap kohesi sosial. Sikap ini adalah wujud nilai *Harmony* dan *Nationalism* sekaligus syarat mutu akademik.

7.5 Studi Kasus

Pilkada dan alokasi layanan di Kabupaten Tiga Pulau (kasus ilustrasi)

Kabupaten Tiga Pulau memiliki tiga kelompok suku besar dan dua agama dominan. Pada pilkada terakhir, salah satu kandidat membangun narasi "saatnya putra asli memimpin", sementara kandidat lain menyusun tim dari semua suku dan menjanjikan standar layanan yang sama untuk setiap pulau. Setelah pelantikan, data belanja menunjukkan pembangunan puskesmas pembantu terkonsentrasi di dua pulau dengan basis dukungan terkuat, sedangkan satu pulau dengan angka kematian ibu tertinggi tidak memperoleh tambahan fasilitas. Notula musrenbang kecamatan di pulau tersebut mencatat usulan yang sama selama tiga tahun berturut-turut. Forum lintas agama setempat kemudian memfasilitasi dialog dan mengusulkan kriteria alokasi berbasis data kesehatan.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Klasifikasikan bentuk dan mekanisme politik identitas dalam kasus ini (Tabel 7.1).
2. Nilai kedua strategi kampanye dengan Tabel 7.2. Mana yang inklusif-konstruktif, dan apa buktinya?
3. Evaluasi pengaruh politik identitas pada proses dan substansi kebijakan menggunakan Tabel 7.3.
4. Rumuskan satu rekomendasi berbasis nilai kebhinnekaan yang dapat mencegah ketimpangan serupa, dan sebutkan indikator keberhasilannya.

7.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 11 — Kerangka analisis politik identitas

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan kerangka analisis politik identitas: definisi, tipologi, dan mekanisme mobilisasi.
- Diskusi analisis kasus dengan mengedepankan perspektif kebhinnekaan; mahasiswa dilatih memberi argumen berbasis data, bukan stereotip.

Daring (LMS)

- Simak video pengantar (15 menit) dan telaah dua artikel atau laporan kasus tentang politik identitas di KTI.
- Susun peta konsep politik identitas di satu daerah KTI dan unggah ke LMS.

Luaran: Peta konsep (mind map) politik identitas di satu daerah KTI: bentuk, mekanisme mobilisasi, dan dampak awal.

Minggu 12 — Evaluasi dampak kebijakan dan kuis analitik

Luring (kelas)

- Kelompok mempresentasikan hasil evaluasi pengaruh politik identitas terhadap kebijakan dan memberi tanggapan kritis yang membangun kepada kelompok lain.
- **Kuis analitik tertulis (30 menit):** menganalisis skenario kebijakan daerah yang dipengaruhi dinamika identitas, dengan kriteria ketepatan evaluasi (40%), kedalaman argumen (40%), dan kelayakan rekomendasi (20%).
- Pada minggu ini juga berlangsung **konsultasi kemajuan wajib** proyek semester beserta draf Bab III.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan pengembangan laporan evaluasi dari peta konsep Minggu 11 beserta rubrik kuis dan contoh kerangka rekomendasi.
- Ikuti sesi tanya jawab sinkron singkat (30 menit) sebelum presentasi dan kuis.

Luaran: Laporan evaluasi pengaruh politik identitas terhadap kualitas kebijakan beserta satu rekomendasi berbasis kebhinnekaan.

7.7 Rangkuman

- Identitas bersifat dibentuk secara sosial, sehingga dapat dipertajam oleh kepentingan politik.
- Politik identitas tidak selalu buruk; yang bermasalah adalah penggunaan identitas untuk menyingkirkan kelompok lain.
- Mobilisasi identitas bekerja melalui pembingkaihan, pembentukan blok dukungan, dan imbalan selektif, dan paling mudah berhasil ketika informasi program terbatas.
- Politik identitas inklusif-konstruktif memperluas pengakuan dan akses; yang eksklusif-destruktif memicu polarisasi dan ketimpangan layanan.
- Evaluasi dampaknya dilakukan pada dimensi proses, substansi, aparatur, kohesi sosial, dan nilai kebhinnekaan, dengan etika penulisan yang ketat.

7.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Pandangan bahwa identitas dibentuk dan dipelihara melalui proses sosial disebut pandangan ...
 - A. primordial
 - B. konstruktivis
 - C. institusional
 - D. rasional
2. Tuntutan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayahnya merupakan contoh politik identitas yang ...
 - A. selalu destruktif
 - B. inklusif-konstruktif jika memperluas keadilan
 - C. tidak termasuk politik identitas
 - D. bertentangan dengan Pancasila

3. Mengubah isu kebijakan menjadi isu "kita melawan mereka" merupakan mekanisme ...
 - A. pembingkaian
 - B. agregasi kepentingan
 - C. triangulasi
 - D. deliberasi
4. Indikator paling kuat bahwa alokasi kebijakan mengikuti garis identitas adalah ...
 - A. pernyataan kandidat saat kampanye
 - B. perbandingan sebaran anggaran dengan data kebutuhan
 - C. komposisi suku penduduk
 - D. jumlah rumah ibadah
5. Dalam menulis temuan tentang kelompok identitas, sikap yang tepat adalah ...
 - A. menyebut seluruh kelompok sebagai pelaku
 - B. memakai stereotip yang umum dipercaya
 - C. menyebut elite atau individu tertentu berdasarkan bukti
 - D. menghindari topik identitas sama sekali

B. Uraian

1. Bedakan politik identitas inklusif-konstruktif dan eksklusif-destruktif menggunakan minimal tiga aspek, lalu berikan satu contoh empiris untuk masing-masing dari konteks Indonesia.
2. Evaluasi pengaruh politik identitas terhadap satu kebijakan daerah di KTI menggunakan kerangka pada Tabel 7.3, lalu rumuskan rekomendasi berbasis kebhinnekaan beserta indikatornya.

7.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 7.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Pandangan konstruktivis melihat identitas sebagai hasil pembentukan sosial.
2	B	Politik identitas dapat memperluas keadilan dan pengakuan.
3	A	Pembingkaian mengubah cara isu dipahami publik.
4	B	Perbandingan alokasi dengan data kebutuhan menunjukkan bias alokasi.
5	C	Tanggung jawab akademik menuntut ketepatan subjek dan bukti.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Tiga aspek pembeda dijelaskan tepat (skor maksimal 10).
- Contoh relevan dan dianalisis, bukan hanya disebut (skor maksimal 10).
- Penilaian dikaitkan dengan nilai Pancasila (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Minimal tiga dimensi dievaluasi dengan bukti (skor maksimal 12).
- Rekomendasi layak, kontekstual, dan terukur (skor maksimal 8).
- Penulisan etis dan bebas stereotip (skor maksimal 5).

7.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang evaluasi kasus Tiga Pulau dengan Tabel 7.2 dan 7.3, mintakan umpan balik dosen di forum LMS, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Telusuri satu praktik kearifan lokal di daerah Anda yang berperan menjaga kohesi sosial, lalu tulis catatan 400 kata tentang cara memanfaatkannya dalam kebijakan daerah.

7.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Pernahkah Anda menilai seseorang berdasarkan identitasnya dalam konteks politik? Apa yang mengubah pandangan Anda?
2. Bagaimana Anda memastikan analisis kelompok Anda tidak memperkuat prasangka?
3. Nilai kebhinnekaan mana yang paling perlu diperkuat di daerah kajian kelompok Anda?

NILAI ICHSA-N

Harmony dan **Nationalism**: menganalisis isu identitas secara dewasa, berbasis data, tanpa generalisasi yang merendahkan, serta memandang keragaman sebagai kekuatan bangsa; **Integrity**: jujur menyampaikan temuan meskipun tidak nyaman bagi kelompok sendiri.

7.12 Referensi Unit

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.

BAB VIII · UNIT 7 · MINGGU 13–14

Kerangka Analisis Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Dari temuan perilaku politik menuju intervensi kebijakan pada SDM aparatur dan pelayanan publik

8.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK7

Merancang kerangka analisis kebijakan yang mengintegrasikan aspek manajemen SDM aparatur dan pelayanan publik sebagai respons terhadap pola perilaku politik yang teridentifikasi pada pemerintahan daerah/desa di Kawasan Timur Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi pola perilaku politik yang memengaruhi manajemen SDM aparatur dan kualitas pelayanan publik pada pemerintahan daerah/desa di KTI.
- Menganalisis keterkaitan antara politisasi birokrasi, kinerja aparatur, dan responsivitas pelayanan publik berdasarkan kasus empiris.
- Merancang kerangka analisis kebijakan yang memuat dimensi SDM aparatur dan pelayanan publik sebagai respons terhadap pola perilaku politik yang teridentifikasi.
- Mengevaluasi kesesuaian kerangka analisis yang dirancang dengan konteks kelembagaan dan regulasi pemerintahan daerah yang berlaku.
- Menyusun rekomendasi kebijakan yang operasional, terukur, dan kontekstual beserta *policy brief* ringkas.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK4	CPL-04 dan CPL-05	15%	2 minggu (1.020 menit)

8.2 Pemantik

Mari memulai

Kelompok Anda telah menemukan bahwa mutasi pejabat mengikuti garis dukungan politik, anggaran bergeser ke basis pendukung, dan layanan di wilayah terluar tertinggal. Seorang sekretaris daerah membaca temuan itu dan bertanya: "Baik, lalu apa yang harus saya lakukan hari Senin?"

Temuan yang tajam belum tentu berguna. Apa yang membuat sebuah rekomendasi bisa dijalankan?

8.3 Peta Konsep



Gambar 8.1 Peta konsep Unit 7

8.4 Uraian Materi

8.4.1 Dari Analisis ke Rancangan

Tiga unit sebelumnya menghasilkan temuan: siapa aktornya, bagaimana perilakunya, dan apa dampaknya. Unit ini menjembatani temuan itu menjadi **kerangka analisis kebijakan**, yaitu alur berpikir yang menghubungkan masalah, penyebab, tujuan, pilihan tindakan, dan indikator keberhasilan. Kerangka inilah yang membuat rekomendasi tidak sekadar menjadi daftar harapan.

Tabel 8.1 Komponen kerangka analisis kebijakan

Komponen	Isi	Contoh pertanyaan penuntun
Rumusan masalah	Kesenjangan antara kondisi yang ada dan yang seharusnya, dinyatakan spesifik dan terukur	Apa masalahnya, di mana, seberapa besar, dan siapa yang dirugikan?
Analisis penyebab	Pohon masalah yang memisahkan gejala, penyebab langsung, dan akar masalah perilaku politik	Mengapa pola ini bertahan? Insentif apa yang menopangnya?
Tujuan kebijakan	Perubahan yang ingin dicapai, dirumuskan secara SMART	Apa yang berubah, sebesar apa, dan kapan?
Opsi kebijakan	Dua sampai tiga alternatif tindakan, termasuk opsi tanpa perubahan	Apa pilihan yang tersedia bagi pembuat keputusan?
Kriteria penilaian opsi	Efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, kewenangan, risiko integritas	Opsi mana yang paling layak dan mengapa?
Rekomendasi operasional	Tindakan dengan pelaksana, waktu, sumber dana, dan indikator	Siapa melakukan apa, kapan, dengan biaya berapa?
Risiko dan mitigasi	Hambatan pelaksanaan beserta cara mengantisipasinya	Apa yang mungkin membuat rekomendasi gagal?

8.4.2 Logika Intervensi

Rekomendasi yang baik memiliki **logika intervensi** yang jelas: masukan (anggaran, regulasi, pelatihan) menghasilkan kegiatan, kegiatan menghasilkan keluaran (produk atau layanan), dan keluaran menghasilkan hasil (perubahan perilaku atau kualitas layanan). Uji logika ini dengan pertanyaan sederhana: jika kegiatan ini dijalankan, mengapa perilaku politik yang menjadi masalah akan berubah? Bila jawabannya tidak jelas, rekomendasi masih menyasar gejala.

8.4.3 Dimensi SDM Aparatur dan Pelayanan Publik

RPS mewajibkan kerangka analisis memuat dua dimensi. **Manajemen SDM aparatur** berpijak pada sistem merit: perencanaan kebutuhan, seleksi terbuka jabatan, uji kompetensi, pola karier, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi. **Pelayanan publik** berpijak pada UU 25/2009: standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, survei kepuasan masyarakat, dan pemanfaatan layanan digital dalam kerangka SPBE.

Tabel 8.2 Titik intervensi pada dua dimensi

Dimensi	Masalah yang lazim ditemukan	Titik intervensi kebijakan	Indikator keberhasilan
SDM aparatur	Mutasi politis, jabatan diisi pelaksana tugas, kompetensi tidak sesuai	Panitia seleksi independen, uji kompetensi wajib, publikasi hasil seleksi, pola karier tertulis	Proporsi jabatan definitif; kesesuaian kualifikasi; jumlah jabatan yang diisi melalui seleksi terbuka
Pelayanan publik	Standar layanan tidak diumumkan, pengaduan tidak ditindaklanjuti, layanan wilayah terluar tertinggal	Maklumat dan standar pelayanan terbuka, kanal pengaduan dengan tenggat jawab, layanan keliling atau digital untuk wilayah terpencil	Persentase pengaduan dijawab tepat waktu; hasil survei kepuasan; cakupan layanan per wilayah

8.4.4 Menguji Kesesuaian dengan Kelembagaan dan Regulasi

Rekomendasi hanya berguna bila berada dalam kewenangan pihak yang disasar. Uji setiap rekomendasi dengan empat pertanyaan: (1) **kewenangan**, apakah urusan ini menjadi kewenangan daerah atau desa menurut UU 23/2014 beserta perubahannya; (2) **dasar hukum**, instrumen apa yang diperlukan, misalnya perda, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala dinas; (3) **anggaran**, apakah dapat dibiayai APBD, APBDes, atau sumber lain yang sah dan pada tahap perencanaan mana harus diusulkan; dan (4) **kapasitas**, apakah aparatur dan sarana yang ada mampu melaksanakannya.

8.4.5 Matriks Rekomendasi Strategis

Tabel 8.3 Format matriks rekomendasi strategis

Rekomendasi	Pelaksana	Dasar hukum	Waktu	Sumber dana	Indikator	Risiko dan mitigasi
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Bandungkan dua rumusan berikut. *"Pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem mutasi pejabat"* belum dapat ditindaklanjuti. *"Sekretaris daerah menerbitkan keputusan tentang pembentukan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan unsur independen, dan mengumumkan hasil setiap tahapan di situs resmi, mulai tahun anggaran berjalan"* dapat langsung dilaksanakan dan dipantau.

8.4.6 Policy Brief

Policy brief adalah ringkasan maksimal empat halaman yang disiapkan untuk pemangku kepentingan non-akademik. Bahasanya lugas, kesimpulannya di awal, dan setiap angka disertai sumber.

Tabel 8.4 Anatomi policy brief (maksimal 4 halaman)

Bagian	Isi	Porsi
Judul dan ringkasan eksekutif	Isu, temuan kunci, dan rekomendasi utama	± 150 kata
Konteks masalah	Deskripsi singkat masalah dan siapa yang terdampak	± 0,5 halaman
Bukti utama	Dua sampai empat temuan dengan data dan sumbernya; boleh memakai tabel atau grafik	± 1 halaman
Opsi dan rekomendasi	Pilihan tindakan dan rekomendasi operasional	± 1,5 halaman
Langkah lanjutan dan kontak	Tindakan pertama yang dapat diambil pekan ini serta kontak penyusun	± 0,25 halaman

Kriteria penilaian kerangka analisis (RPS Minggu 13–14)

Kerangka analisis final dinilai dengan empat kriteria: ketajaman identifikasi masalah perilaku politik (25%), kelengkapan dan koherensi integrasi dimensi SDM aparatur dan pelayanan publik (25%), kualitas rekomendasi yang operasional, terukur, dan kontekstual (30%), serta penggunaan data empiris dan referensi yang sah (20%).

8.5 Studi Kasus**Dua draf rekomendasi untuk Kabupaten Sagu Indah (lanjutan ilustrasi Unit 5)**

Draf A. "Bupati sebaiknya lebih memperhatikan netralitas ASN dan pemerataan anggaran agar pelayanan publik meningkat."

Draf B. "Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat menyusun dan menerbitkan pedoman seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dengan panitia seleksi beranggotakan unsur perguruan tinggi, mengumumkan hasil setiap tahapan di situs resmi, serta melaporkan capaian proporsi jabatan definitif setiap semester kepada bupati dan DPRD. Bappeda menambahkan kriteria kebutuhan layanan kesehatan berbasis data angka kematian ibu dalam penilaian usulan kegiatan pada RKPD tahun berikutnya."

Catatan: contoh ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran.

Pertanyaan analisis:

1. Bandingkan kedua draf menggunakan unsur pelaksana, dasar hukum, waktu, sumber dana, dan indikator.
2. Uji Draf B dengan empat pertanyaan kesesuaian kelembagaan pada Subbab 8.4.4.
3. Susun logika intervensi Draf B: masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil.
4. Tulis satu risiko pelaksanaan Draf B beserta mitigasinya.

8.6 Aktivitas Pembelajaran**Minggu 13 — Menyusun draf kerangka analisis****Luring (kelas)**

- Dosen memaparkan konsep kerangka analisis kebijakan berbasis perilaku politik dengan contoh kasus daerah KTI.
- Kelompok menyusun draf kerangka dan mengikuti sesi tinjauan sejawat; umpan balik diberikan berbasis argumen, bukan opini subjektif.

Daring (LMS)

- Simak video penjelasan kerangka analisis kebijakan dan unduh templat kerangka beserta rubrik penilaian di LMS.
- Susun draf kerangka analisis kelompok dan unggah untuk memperoleh umpan balik tertulis dosen.

Luaran: **Draf kerangka analisis kebijakan** yang memuat rumusan masalah, penyebab, dimensi SDM aparatur dan pelayanan publik, serta arah rekomendasi.

Minggu 14 — Finalisasi kerangka, rekomendasi, dan policy brief

Luring (kelas)

- Presentasi lintas kelompok atas kerangka analisis final; mahasiswa memberikan tanggapan substantif terhadap kerangka kelompok lain.
- Dosen menilai kerangka final dengan rubrik empat kriteria dan memberi catatan perbaikan untuk laporan.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan revisi dan contoh kerangka analisis yang telah dianonimkan; manfaatkan konsultasi asinkron di forum LMS.
- Susun **matriks rekomendasi strategis** dan *policy brief*; finalisasi laporan, *policy brief*, dan slide (maksimal 15 slide) untuk pengumpulan dokumen lengkap.

Luaran: **Kerangka analisis kebijakan final, matriks rekomendasi strategis, dan _policy brief_** maksimal 4 halaman.

8.7 Rangkuman

- Kerangka analisis kebijakan menghubungkan masalah, penyebab, tujuan, opsi, kriteria, rekomendasi, serta risiko dan mitigasi.
- Logika intervensi menguji apakah kegiatan yang diusulkan benar-benar dapat mengubah perilaku politik yang menjadi masalah.
- Dimensi SDM aparatur berpijak pada sistem merit; dimensi pelayanan publik berpijak pada standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
- Setiap rekomendasi diuji dari sisi kewenangan, dasar hukum, anggaran, dan kapasitas pelaksana.
- Rekomendasi operasional menyebut pelaksana, waktu, sumber dana, dan indikator; *policy brief* meringkasnya untuk pemangku kepentingan.

8.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Komponen kerangka analisis kebijakan yang memisahkan gejala, penyebab langsung, dan akar masalah adalah ...
 - A. rumusan masalah
 - B. analisis penyebab
 - C. opsi kebijakan
 - D. indikator

2. Pertanyaan "jika kegiatan ini dijalankan, mengapa perilaku politik yang menjadi masalah akan berubah?" menguji ...
 - A. logika intervensi
 - B. kelayakan anggaran
 - C. kesesuaian regulasi
 - D. kapasitas aparatur
3. Panitia seleksi independen dan uji kompetensi wajib merupakan titik intervensi pada dimensi ...
 - A. pelayanan publik
 - B. SDM aparatur
 - C. keuangan daerah
 - D. pengawasan legislatif
4. Rekomendasi disebut operasional apabila ...
 - A. menggunakan bahasa akademis yang kuat
 - B. menyebut pelaksana, waktu, sumber dana, dan indikator
 - C. didukung banyak referensi
 - D. disetujui seluruh anggota kelompok
5. Dalam *policy brief*, kesimpulan dan rekomendasi utama diletakkan ...
 - A. di akhir dokumen
 - B. di bagian awal, dalam ringkasan eksekutif
 - C. dalam lampiran
 - D. dalam catatan kaki

B. Uraian

1. Susun kerangka analisis kebijakan ringkas (rumusan masalah, penyebab, tujuan, dan dua opsi) atas satu pola perilaku politik yang ditemukan kelompok Anda.
2. Tulis dua rekomendasi operasional dengan format Tabel 8.3 dan uji keduanya dari sisi kewenangan, dasar hukum, anggaran, serta kapasitas pelaksana.

8.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 8.5 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Analisis penyebab biasanya memakai pohon masalah.
2	A	Pertanyaan itu menguji rantai logika dari kegiatan menuju hasil.
3	B	Keduanya berkaitan dengan sistem merit dalam manajemen aparatur.
4	B	Unsur pelaksana, waktu, dana, dan indikator membuat rekomendasi dapat dijalankan dan dipantau.
5	B	Policy brief menempatkan kesimpulan di awal agar cepat dibaca pembuat keputusan.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Rumusan masalah spesifik dan terukur (skor maksimal 7).
- Analisis penyebab membedakan gejala dan akar masalah (skor maksimal 8).
- Dua opsi disertai kriteria penilaian (skor maksimal 10).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Kedua rekomendasi lengkap unsurnya dan terukur (skor maksimal 12).
- Uji kesesuaian kelembagaan dijawab dengan tepat (skor maksimal 8).
- Indikator dan risiko dinyatakan jelas (skor maksimal 5).

8.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki Draf A pada studi kasus menjadi rekomendasi operasional dengan Tabel 8.3, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Ubah satu rekomendasi kelompok menjadi rancangan satu halaman keputusan kepala daerah atau peraturan desa, lengkap dengan konsiderans dan indikator pelaksanaan.

8.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Rekomendasi kelompok Anda mana yang paling sulit dibuat operasional, dan mengapa?
2. Masukan sejawat mana yang paling mengubah kerangka analisis kelompok Anda?
3. Bagaimana Anda memastikan rekomendasi tetap berada dalam kewenangan pihak yang disasar?

NILAI ICHSA-N

Creativity dan **Adaptability**: merancang kerangka dan rekomendasi yang orisinal serta bersedia merevisinya berdasarkan tinjauan sejawat; **Service**: menjadikan peningkatan mutu layanan bagi warga sebagai tujuan akhir rancangan.

8.12 Referensi Unit

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Grindle, M. S. (2012). *Jobs for the Boys: Patronage and the State in Comparative Perspective*. Harvard University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Risiko Korupsi*. KPK RI.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

BAB IX · UNIT 8 · MINGGU 15

Laporan Analisis Kebijakan Final dan Presentasi Argumentatif

Sintesis temuan lintas semester, pertanggungjawaban argumen, dan peer review antarkelompok

9.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK8

Menghasilkan laporan analisis kebijakan final yang memuat rekomendasi strategis pengelolaan perilaku politik untuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif pada konteks pemerintahan daerah/desa di Kawasan Timur Indonesia, dan mempresentasikannya secara argumentatif.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menghasilkan laporan analisis kebijakan final yang memuat rekomendasi strategis pengelolaan perilaku politik untuk tata kelola yang akuntabel dan kolaboratif.
- Mengintegrasikan temuan seluruh kajian semester (perilaku politik, budaya politik, aktor, partai, birokrasi, anggaran, dan identitas) ke dalam satu narasi analisis yang koheren.
- Mempresentasikan laporan secara argumentatif dan merespons pertanyaan kritis dengan rujukan konseptual serta data empiris yang sah.
- Mengevaluasi implikasi rekomendasi terhadap akuntabilitas, partisipasi masyarakat sipil, dan kolaborasi antarpihak dalam tata kelola pemerintahan daerah.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK4	CPL-04 dan CPL-05	15%	1 minggu (510 menit)

9.2 Pemantik

Mari memulai

Bayangkan kelompok pembahas bertanya: "Kalian menyebut ada politisasi birokrasi, politik anggaran, dan politik identitas sekaligus. Mana yang paling menentukan buruknya layanan di daerah ini, dan apa buktinya?"

Pertanyaan itu menguji apakah laporan Anda satu narasi utuh atau lima bab yang berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana kelompok Anda akan menjawabnya dalam dua menit?

9.3 Peta Konsep



Gambar 9.1 Peta konsep Unit 8

9.4 Uraian Materi

9.4.1 Sintesis Integratif: Menemukan Benang Merah

Laporan final bukan gabungan tugas mingguan, melainkan **satu argumen** yang menjawab satu pertanyaan analisis. Cara menemukan benang merahnya: tetapkan satu pertanyaan utama, lalu tunjukkan bagaimana setiap temuan menjadi mata rantai jawabannya. Sebagai contoh, orientasi politik warga yang lemah (Unit 1–2) memperbesar ruang bagi mobilisasi identitas (Unit 6); mobilisasi itu melahirkan koalisi transaksional (Unit 3–4); koalisi tersebut dipelihara melalui mutasi jabatan dan alokasi anggaran (Unit 5); dan akibat akhirnya adalah layanan yang tidak merata. Rekomendasi (Unit 7) lalu diarahkan pada mata rantai yang paling mungkin diubah.

9.4.2 Sistematika dan Standar Laporan

Tabel 9.1 Sistematika Laporan Analisis Kebijakan (minimal 5.000 kata)

Bagian	Isi	Sumber temuan
Pendahuluan	Konteks kasus, justifikasi pemilihan, pertanyaan analisis, argumen utama, dan metode	Proposal Kasus (Minggu 4)
Pemetaan aktor dan sosialisasi politik	Matriks aktor, orientasi dan sosialisasi politik warga pada konteks lokal	Unit 1–2; luaran Minggu 5–6
Analisis perilaku aktor	Pola perilaku eksekutif, legislatif, partai, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil	Unit 3–4; draf Bab II
Evaluasi politisasi birokrasi, politik anggaran, dan politik identitas	Temuan berbasis dokumen resmi dan data terverifikasi	Unit 5–6; draf Bab III
Kerangka analisis kebijakan dan rekomendasi strategis	Kerangka, matriks rekomendasi, logika intervensi, risiko dan mitigasi	Unit 7
Penutup	Jawaban atas pertanyaan analisis, keterbatasan kajian, dan agenda lanjutan	Sintesis
Daftar pustaka dan lampiran	Rujukan, tabel data, lembar konsultasi, Log Kontribusi Individu	Seluruh proses

Standar penulisan: bahasa Indonesia baku, sitasi konsisten dengan format penulis-tahun, setiap tabel dan gambar diberi nomor serta sumber, dan seluruh klaim faktual dapat ditelusuri. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan (PDF), *policy brief* maksimal 4 halaman, slide maksimal 15 halaman, Log Kontribusi Individu bertanda tangan, serta dokumentasi presentasi.

9.4.3 Presentasi Argumentatif

Presentasi bukan pembacaan laporan. Susun alur: (1) kasus dan pertanyaan analisis; (2) temuan kunci beserta bukti terkuat; (3) rantai sebab-akibat; (4) rekomendasi operasional; (5) implikasi dan ajakan bertindak. Setiap anggota tampil dan siap menjawab pertanyaan tentang bagian mana pun, karena penguasaan materi dinilai secara kolektif. Ketika pertanyaan menyingkap kelemahan yang sah, akui dan jelaskan rencana perbaikannya; kejujuran ini justru memperkuat kredibilitas kelompok.

9.4.4 Peer Review sebagai Kelompok Pembahas

Setiap kelompok juga berperan sebagai pembahas bagi kelompok lain, dan mutu umpan balik itu dinilai. Umpan balik yang baik bersifat spesifik, berbasis argumen, dan menawarkan jalan perbaikan. Gunakan empat pertanyaan pembahas: apakah klaim didukung bukti yang cukup; apakah kerangka teoretis dipakai secara tepat; apakah rekomendasi berada dalam kewenangan pihak yang disasar; dan apakah ada penjelasan alternatif yang belum dipertimbangkan.

9.4.5 Implikasi Rekomendasi bagi Tata Kelola

Bagian penutup laporan menilai implikasi rekomendasi pada tiga hal. **Akuntabilitas:** apakah rekomendasi menambah kejelasan siapa bertanggung jawab atas apa, dan bagaimana kinerjanya dilaporkan. **Partisipasi masyarakat sipil:** apakah warga dan organisasinya memperoleh ruang memantau pelaksanaan. **Kolaborasi antarpihak:** apakah rekomendasi mendorong kerja bersama pemerintah daerah, desa, masyarakat sipil, dan dunia usaha, atau justru menambah beban satu pihak saja. Perspektif Ostrom (1990) tentang aturan bersama yang dibangun para pihak berguna untuk menilai dimensi terakhir ini.

9.4.6 Revisi Final dan Pertanggungjawaban Kontribusi

Setelah presentasi Minggu 15, kelompok merevisi laporan berdasarkan masukan pembahas dan dosen, lalu mengumpulkan versi final beserta Log Kontribusi Individu pada Minggu 16. Log ini memuat uraian peran dan persentase kontribusi setiap anggota, dan menjadi dasar penyesuaian nilai individu hingga $\pm 10\%$ dari nilai kelompok. Tidak ada penerimaan dokumen setelah Minggu 16, dan keterlambatan dikenai pengurangan 5 poin per hari.

9.5 Studi Kasus

Menilai kesiapan laporan final (ilustrasi)

Sebuah kelompok menyerahkan laporan 5.200 kata. Bab pemetaan aktor sangat rinci dengan matriks 12 aktor. Bab evaluasi politik anggaran memuat tabel perubahan pagu tiga tahun beserta sumbernya. Namun, bab rekomendasi hanya memuat empat butir berupa imbauan umum tanpa pelaksana dan indikator; penutup tidak menjawab pertanyaan analisis yang diajukan di pendahuluan; dan dua kutipan angka tidak mencantumkan sumber. Dalam presentasi, hanya satu anggota yang mampu menjawab pertanyaan.

Pertanyaan analisis:

1. Kriteria rubrik mana yang paling lemah pada laporan tersebut?

2. Susun tiga saran perbaikan yang spesifik dan dapat dikerjakan dalam satu pekan.
3. Bagaimana kelompok seharusnya menyiapkan diri agar seluruh anggota dapat menjawab pertanyaan?

9.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 15 — Presentasi argumentatif dan peer review

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan laporan analisis kebijakan final secara argumentatif, lalu merespons pertanyaan kritis dari dosen dan kelompok pembahas.
- Kelompok pembahas menyampaikan umpan balik terstruktur menggunakan empat pertanyaan pembahas; seluruh mahasiswa mengikuti rangkaian presentasi.
- Dosen menutup dengan sintesis lintas kasus tentang pola perilaku politik di KTI dan implikasinya bagi tata kelola.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan penyusunan laporan final dan rubrik penilaian presentasi di LMS; simak rangkuman poin kritis penyusunan rekomendasi strategis.
- Unggah laporan final, *policy brief*, slide, dan dokumentasi presentasi; siapkan Log Kontribusi Individu untuk pengumpulan Minggu 16.

Luaran: Laporan Analisis Kebijakan final, *_policy brief_*, slide presentasi, dan dokumentasi; revisi final beserta Log Kontribusi Individu dikumpulkan pada Minggu 16.

9.7 Rangkuman

- Laporan final adalah satu argumen yang menjawab satu pertanyaan analisis, bukan gabungan tugas mingguan.
- Sistematika laporan mengikuti tujuh bagian sesuai Rencana Tugas, dengan panjang minimal 5.000 kata dan seluruh klaim yang dapat ditelusuri.
- Presentasi argumentatif menuntut alur yang jelas, bukti terkuat di depan, dan kesiapan setiap anggota menjawab pertanyaan.
- Mutu umpan balik sebagai kelompok pembahas juga dinilai; gunakan empat pertanyaan pembahas.
- Implikasi rekomendasi dinilai dari sisi akuntabilitas, partisipasi masyarakat sipil, dan kolaborasi antarpihak.

9.8 Latihan: Swa-Nilai Laporan dan Presentasi

Nilai kesiapan kelompok Anda dengan daftar periksa berikut. Beri skor 0 (belum), 1 (sebagian), atau 2 (sudah baik). Skor maksimum 20; tingkat penguasaan = $(\text{jumlah skor} \div 20) \times 100\%$.

Tabel 9.2 Daftar periksa laporan final dan presentasi

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
1	Pertanyaan analisis dan argumen utama dinyatakan jelas di pendahuluan dan dijawab di penutup.	
2	Ketujuh bagian sistematika lengkap dan panjang laporan memenuhi ketentuan.	

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
3	Temuan lintas unit terhubung sebagai satu rantai sebab-akibat, bukan bab yang terpisah.	
4	Setiap klaim faktual disertai sumber yang dapat ditelusuri dan ditriangulasi.	
5	Kerangka teoretis dipakai secara tepat, bukan sekadar dikutip.	
6	Matriks rekomendasi memuat pelaksana, dasar hukum, waktu, dana, indikator, dan risiko.	
7	Implikasi terhadap akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi dinilai.	
8	<i>Policy brief</i> maksimal 4 halaman dan dapat dipahami audiens non-akademik.	
9	Slide maksimal 15 halaman, ringkas, dan mencantumkan sumber data.	
10	Seluruh anggota siap menjawab pertanyaan; Log Kontribusi Individu lengkap dan ditandatangani.	
	Jumlah	

9.9 Rubrik Penilaian Laporan Final dan Presentasi

Rubrik berikut memakai kriteria dan bobot dari RPS Minggu 15. Rubrik final project secara keseluruhan (kriteria a–g Rencana Tugas) disajikan pada Bab X.

Tabel 9.3 Rubrik laporan final dan presentasi argumentatif

Kriteria (bobot)	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Integrasi temuan lintas topik (25%)	Seluruh temuan terhubung sebagai satu narasi kausal yang koheren	Terhubung dengan sedikit lompatan	Bab berjalan terpisah	Tidak terintegrasi
Kualitas rekomendasi strategis (30%)	Spesifik, terukur, kontekstual, dan berada dalam kewenangan	Operasional dengan sedikit kelemahan	Masih berupa imbauan umum	Tidak relevan
Presentasi dan argumentasi (30%)	Jelas, meyakinkan, seluruh anggota menguasai materi	Jelas dan memadai	Sebagian anggota tidak mampu menjawab	Tidak mampu mempertahankan temuan
Tata tulis laporan (15%)	Struktur runtut, bahasa baku, referensi cukup dan konsisten	Runtut dengan sedikit kesalahan	Kurang runtut, sitasi tidak konsisten	Tidak sistematis

Persiapan UAS (Minggu 16)

UAS mengukur Sub-CPMK5–8. Pastikan revisi final laporan, *policy brief*, slide, dan Log Kontribusi Individu telah diunggah pada Minggu 16, dan setiap anggota siap mempertanggungjawabkan kontribusinya. Ketentuan dan kisi-kisi UAS disajikan pada Bab X.

9.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki butir daftar periksa yang bernilai 0 atau 1, konsultasikan kepada dosen melalui forum LMS, lalu lakukan swa-nilai ulang sebelum pengumpulan final.
≥ 90% (pengayaan)	Sampaikan <i>policy brief</i> kelompok kepada satu pemangku kepentingan di daerah kajian (dengan pendampingan dosen) dan catat tanggapannya sebagai bahan tindak lanjut.

9.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Mata rantai mana yang paling menentukan dalam kasus kelompok Anda, dan apa bukti terkuatnya?
2. Pertanyaan pembahas mana yang paling sulit dijawab, dan bagaimana Anda memperbaiki laporan setelahnya?
3. Apa yang berubah dari cara Anda memandang perilaku politik sejak Minggu 1?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Adaptability: mempertahankan temuan secara jujur serta bersedia merevisi berdasarkan tinjauan sejawat; **Harmony dan Service:** memberi umpan balik yang membangun kepada kelompok lain dan mengarahkan rekomendasi bagi kepentingan warga daerah.

9.12 Referensi Unit

- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Lasswell, H. D. (1958). *Politics: Who Gets What, When, How*. Meridian Books.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.

BAB X · ASESMEN SUMATIF

Asesmen Sumatif dan Integrasi Penilaian

Rekonsiliasi bobot, kisi-kisi UTS dan UAS, rubrik, dan pengukuran ketercapaian CPMK serta CPL

10.1 Prinsip Asesmen

Asesmen mata kuliah ini dirancang dengan prinsip keselarasan konstruktif: setiap instrumen mengukur Sub-CPMK tertentu, bobotnya proporsional dengan tingkat kesulitan capaian, dan kriterianya diumumkan sejak awal. Asesmen bersifat **otentik** (kasus dan dokumen nyata), **berkelanjutan** (formatif dan sumatif), **transparan** (rubrik dibagikan), serta **akuntabel** (nilai dicatat per Sub-CPMK di SI-OBE). Karena mata kuliah ini menganalisis aktor nyata, mutu bukti dan kejujuran akademik menjadi bagian dari yang dinilai.

10.2 Rekonsiliasi Bobot Komponen dan Sub-CPMK

Tabel berikut mengikuti tabel Rekonsiliasi Bobot pada RPS. Penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK (Tabel 1.6), dan penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian (Tabel 1.10).

Tabel 10.1 Rekonsiliasi bobot komponen penilaian dan Sub-CPMK (%)

Sub-CPMK	Kuis	Tugas Kasus	UTS	Proyek	UAS	Bobot
Sub-CPMK1	10	—	5	—	—	15
Sub-CPMK2	—	4	5	—	—	9
Sub-CPMK3	—	3	5	—	—	8
Sub-CPMK4	—	3	5	—	—	8
Sub-CPMK5	—	—	—	10	5	15
Sub-CPMK6	—	—	—	10	5	15
Sub-CPMK7	—	—	—	10	5	15
Sub-CPMK8	—	—	—	10	5	15
Bobot komponen	10	10	20	40	20	100

10.2.1 Perhitungan Nilai Akhir dan Ketercapaian

1. **Nilai Sub-CPMK** = rata-rata tertimbang nilai komponen yang mengukurnya, memakai bobot pada baris Tabel 10.1. Untuk komponen yang mengukur beberapa Sub-CPMK (UTS, Proyek, UAS), gunakan skor per butir soal atau per kriteria rubrik.
2. **Nilai akhir** = $\Sigma (\text{nilai komponen} \times \text{bobot komponen}) \div 100$, yang hasilnya identik dengan $\Sigma (\text{nilai Sub-CPMK} \times \text{bobot Sub-CPMK}) \div 100$.
3. **Ketercapaian CPL** = rata-rata tertimbang nilai Sub-CPMK dengan bobot pada kolom CPL di Tabel 1.6; ketercapaian CPMK dihitung dari Sub-CPMK penyusunnya (Tabel 1.5).

Tabel 10.2 Contoh perhitungan untuk seorang mahasiswa (data ilustrasi)

Komponen	Kuis	Tugas Kasus	UTS	Proyek	UAS
Nilai (0–100)	78	80	74	82	76

Sub-CPMK	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	76,67	76,67	76,25	76,25	80,00	80,00	80,00	80,00

Hasil	Nilai
Nilai akhir	78,60 (huruf B)
Ketercapaian CPL-01	78,51
Ketercapaian CPL-03	76,48
Ketercapaian CPL-04	79,31
Ketercapaian CPL-05	80,00

Ambang ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK ditetapkan pada skor 70. Rekap kelas dipakai untuk menilai apakah capaian memenuhi ambang yang ditetapkan program studi dan untuk merencanakan perbaikan pembelajaran.

10.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS

UTS dilaksanakan pada Minggu 8 dalam bentuk ujian tertulis berbasis kasus selama 100 menit dan mencakup Sub-CPMK1–4. Karena kontribusi UTS terhadap setiap Sub-CPMK sama besar (5% per Sub-CPMK), skor tiap kelompok soal dibuat setara.

Tabel 10.3 Kisi-kisi UTS

No.	Sub-CPMK	Indikator yang diukur	Level	Skor
1	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep orientasi, partisipasi, dan budaya politik serta mengklasifikasikan tipe budaya politik pada kasus	C2–C4	25
2	Sub-CPMK2	Menganalisis agen sosialisasi politik dan pembentukan orientasi warga pada kasus	C4	25
3	Sub-CPMK3	Menganalisis pola interaksi eksekutif-legislatif dan faktor penentu perilakunya	C4	25
4	Sub-CPMK4	Memetakan perilaku partai, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil serta membedakan kepentingan, akses, dan pengaruh	C4	25
			Jumlah	100

Contoh naskah UTS — Kabupaten Lembah Pinang (ilustrasi)

Kabupaten Lembah Pinang memiliki 14 kecamatan, empat di antaranya berada di pulau kecil. Pada pilkada terakhir, kandidat pemenang diusung koalisi lima partai. Kampanye banyak disebarakan melalui pertemuan keluarga besar dan kelompok pengajian serta jemaat; warga di kecamatan kepulauan

mengaku mengetahui calon terutama dari penjelasan tokoh kampung. Setelah pelantikan, rancangan perda tentang retribusi pelayanan kesehatan diajukan pemerintah daerah, tetapi pembahasannya berlarut karena dua fraksi menuntut penambahan program bantuan sarana di daerah pemilihan mereka. Asosiasi badan dan sebuah LSM kesehatan menyerahkan kajian yang kemudian dikutip dalam rapat dengar pendapat, sedangkan sekelompok warga kepulauan menggelar aksi damai di kantor bupati karena puskesmas pembantu kosong tenaga.

Kasus ini fiktif dan disusun untuk keperluan ujian.

Soal:

1. Jelaskan perbedaan orientasi, partisipasi, dan budaya politik, lalu klasifikasikan tipe budaya politik warga kecamatan kepulauan dan kecamatan ibu kota dalam kasus ini beserta buktinya. (25)
2. Analisis agen sosialisasi politik yang paling berpengaruh di kecamatan kepulauan dan jelaskan dampaknya terhadap dimensi orientasi politik warga. (25)
3. Analisis pola interaksi eksekutif-legislatif dalam pembahasan rancangan perda tersebut, sebutkan indikatornya, dan jelaskan dua faktor yang memengaruhi perilaku aktor. (25)
4. Petakan perilaku partai politik, asosiasi badan, LSM, dan kelompok warga kepulauan. Sejauh mana Anda dapat menyimpulkan pengaruh masing-masing? Bedakan kepentingan, akses, dan pengaruh. (25)

Tabel 10.4 Pedoman penskoran UTS

No.	Unsur jawaban yang diharapkan
1	Perbedaan tiga konsep tepat (10); klasifikasi tipe budaya politik kedua wilayah dengan bukti kasus (15).
2	Identifikasi agen dominan dan mekanismenya (12); kaitan dengan dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif (13).
3	Pola interaksi diidentifikasi dengan indikator (13); dua faktor penentu dijelaskan (12).
4	Pemetaan empat aktor beserta tipenya (13); pembedaan kepentingan, akses, dan pengaruh secara tepat (12).

10.4 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UAS

UAS dilaksanakan pada Minggu 16 dalam bentuk ujian tertulis berbasis kasus selama 100 menit dan mencakup Sub-CPMK5–8, dengan kontribusi 5% per Sub-CPMK sehingga skor tiap kelompok soal setara. Pada minggu yang sama berlangsung batas akhir pengumpulan revisi final Laporan Analisis

Kebijakan beserta Log Kontribusi Individu; keduanya dinilai pada komponen Proyek Analisis Kebijakan, bukan pada UAS.

Tabel 10.5 Kisi-kisi UAS

No.	Sub-CPMK	Indikator yang diukur	Level	Skor
1	Sub-CPMK5	Mengevaluasi indikasi politisasi birokrasi dan politik anggaran pada kasus dengan prinsip antikorupsi	C5	25
2	Sub-CPMK6	Mengevaluasi pengaruh politik identitas terhadap proses dan substansi kebijakan	C5	25
3	Sub-CPMK7	Merancang kerangka analisis kebijakan dengan dimensi SDM aparatur dan pelayanan publik	C6	25
4	Sub-CPMK8	Menyusun rekomendasi strategis dan menilai implikasinya bagi akuntabilitas, partisipasi, dan kolaborasi	C6	25
			Jumlah	100

Contoh naskah UAS — Desa Rana Mekar dan Kabupaten Batu Pualam (ilustrasi)

Setelah pergantian kepala daerah, 38 pejabat Kabupaten Batu Pualam dimutasi; empat jabatan pimpinan tinggi pratama diisi tanpa dokumen seleksi terbuka yang dapat diakses publik. Dalam APBD tahun berikutnya, belanja bantuan sarana meningkat dan tersebar di kecamatan basis dukungan, sedangkan anggaran operasional puskesmas di dua kecamatan pesisir tetap. Di Desa Rana Mekar, musyawarah desa didominasi dua marga besar; usulan kelompok perempuan tentang air bersih tidak masuk dalam APBDes selama dua tahun. Laporan hasil pemeriksaan mencatat temuan pada belanja hibah, dan survei kepuasan layanan kesehatan kabupaten menurun.

Kasus dan data ini fiktif dan disusun untuk keperluan ujian.

Soal:

1. Evaluasi indikasi politisasi birokrasi dan politik anggaran dalam kasus ini. Sebutkan norma pembandingnya, bukti yang tersedia, dan batas kesimpulan yang sah. (25)
2. Evaluasi pengaruh dinamika identitas di Desa Rana Mekar terhadap proses dan substansi kebijakan desa, serta dampaknya bagi kohesivitas sosial. (25)
3. Rancang kerangka analisis kebijakan ringkas (rumusan masalah, penyebab, tujuan, dan dua opsi) yang memuat dimensi SDM aparatur dan pelayanan publik. (25)
4. Susun dua rekomendasi strategis yang operasional beserta indikatornya, lalu nilai implikasinya terhadap akuntabilitas, partisipasi masyarakat sipil, dan kolaborasi antarpihak. (25)

Tabel 10.6 Pedoman penskoran UAS

No.	Unsur jawaban yang diharapkan
1	Norma pembanding (merit, dokumen perencanaan) disebut (8); bukti dievaluasi (10); batas kesimpulan dinyatakan (7).
2	Mekanisme dominasi identitas dianalisis (10); dampak pada proses dan substansi (10); kaitan dengan kohesi sosial (5).
3	Rumusan masalah dan analisis penyebab tepat (12); kedua dimensi terintegrasi dalam opsi (13).
4	Dua rekomendasi operasional dengan indikator (15); penilaian implikasi pada tiga aspek (10).

10.5 Rubrik Penilaian Komponen

Rubrik partisipasi dan rubrik proyek berikut mengikuti RPS (bagian 5.1 dan 5.2). Rubrik mutu tugas analisis kasus, kuis, dan presentasi merupakan pelengkap yang disusun modul karena rubrik RPS 5.1 mengukur sikap dan partisipasi, bukan mutu analisis.

Tabel 10.7 Rubrik partisipasi dan sikap (RPS 5.1)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Keaktifan	Aktif dan relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
Kualitas kontribusi	Gagasan bernas dan menambah wawasan	Gagasan baik	Gagasan umum	Tidak berbobot
Menghargai pendapat	Menyimak dan menanggapi secara santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi atau abai
Tanggung jawab tugas	Selalu siap dan tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
Etika dan sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

Tabel 10.8 Rubrik mutu Tugas Analisis Kasus (pelengkap)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketepatan konsep	Konsep unit terkait diterapkan tepat dan mendalam	Tepat dengan sedikit kekeliruan	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
Kedalaman analisis	Menjelaskan pola dan sebab-akibat secara kritis	Analisis memadai	Deskriptif	Tidak ada analisis
Mutu bukti	Data resmi, ditriangulasi, sumber lengkap	Sebagian besar bersumber	Sumber terbatas	Tanpa sumber
Etika penulisan	Adil, dugaan disebut sebagai dugaan, sitasi konsisten	Baik	Kurang cermat	Menuduh tanpa bukti

Tabel 10.9 Rubrik Kuis Konsep (butir uraian dan analisis kasus)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketepatan konsep	Definisi dan klasifikasi tepat	Tepat dengan sedikit kekeliruan	Sebagian keliru	Keliru
Kualitas argumentasi	Argumen runtut dan terbukti	Memadai	Dangkal	Tanpa argumen
Relevansi contoh	Contoh tepat dan kontekstual	Cukup relevan	Kurang tepat	Tidak ada contoh

Tabel 10.10 Rubrik Proyek Analisis Kebijakan (RPS 5.2)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
Kualitas produk atau luaran	Laporan, <i>policy brief</i> , dan slide berkualitas tinggi	Baik dengan sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak memenuhi ketentuan
Kreativitas dan inovasi	Kerangka dan rekomendasi sangat orisinal	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru atau biasa
Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat dan mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
Kerja tim dan tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
Presentasi hasil	Meyakinkan dan jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

Nilai komponen Proyek Analisis Kebijakan dihitung dari kriteria Rencana Tugas Mahasiswa berikut, yang sekaligus menunjukkan Sub-CPMK yang dibuktikan setiap luaran.

Tabel 10.11 Kriteria penilaian final project (Rencana Tugas) dan Sub-CPMK

Kriteria	Bobot	Sub-CPMK yang dibuktikan
a. Proposal dan justifikasi pemilihan kasus	10%	Sub-CPMK5–8 (dasar kajian)
b. Pemetaan aktor, analisis sosialisasi, dan orientasi politik	15%	Sub-CPMK5
c. Analisis perilaku aktor eksekutif, legislatif, parpol, dan kelompok kepentingan	20%	Sub-CPMK5
d. Evaluasi politisasi birokrasi, politik anggaran, dan politik identitas	20%	Sub-CPMK6
e. Kerangka analisis kebijakan dan rekomendasi strategis	20%	Sub-CPMK7
f. <i>Policy brief</i>	5%	Sub-CPMK8
g. Presentasi argumentatif dan <i>peer review</i>	10%	Sub-CPMK8
	100%	

Tabel 10.12 Rubrik presentasi argumentatif dan peer review

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Sistematika penyampaian	Alur utuh dari kasus hingga rekomendasi	Runtut	Kurang runtut	Tidak terstruktur
Mempertahankan temuan	Jawaban tepat, terbukti, dan jujur mengakui keterbatasan	Memadai	Sebagian tidak terjawab	Tidak mampu
Mutu umpan balik sebagai pembahas	Spesifik, berargumen, menawarkan perbaikan	Cukup spesifik	Umum	Tidak memberi umpan balik
Penguasaan kolektif	Seluruh anggota menguasai materi	Sebagian besar menguasai	Hanya satu dua anggota	Tidak siap

10.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Pada akhir semester, dosen pengampu menganalisis rekap ketercapaian Sub-CPMK, CPMK, dan CPL dari SI-OBE, hasil kuesioner umpan balik mahasiswa (Lampiran 12), catatan konsultasi kemajuan, serta catatan pelaksanaan pembelajaran. Sub-CPMK atau CPL yang capaiannya di bawah ambang program studi menjadi prioritas perbaikan, baik pada materi, aktivitas, maupun instrumen asesmen. Hasil analisis dilaporkan dalam Portofolio Mata Kuliah dan menjadi dasar peninjauan RPS serta revisi modul sesuai siklus PPEPP.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Agen sosialisasi politik	Pihak yang menyalurkan nilai dan pengetahuan politik: keluarga, sekolah, media, partai, kelompok sebaya, tokoh agama dan adat.
Agregasi kepentingan	Fungsi menggabungkan berbagai tuntutan menjadi alternatif kebijakan.
Artikulasi kepentingan	Fungsi menyatakan tuntutan kelompok kepada pembuat keputusan.
Budaya politik	Pola orientasi politik yang dominan dalam suatu masyarakat.
Budaya kewargaan	Campuran budaya politik yang menopang demokrasi stabil menurut Almond dan Verba.
Kelompok kepentingan	Kelompok yang berupaya memengaruhi kebijakan tanpa bermaksud menduduki jabatan publik.
Kerangka analisis kebijakan	Alur berpikir yang menghubungkan masalah, penyebab, tujuan, opsi, rekomendasi, dan indikator.
Logika intervensi	Rantai dari masukan, kegiatan, keluaran, hingga hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan.
Netralitas ASN	Asas bahwa aparatur sipil negara tidak berpihak kepada partai, kandidat, atau golongan dalam menjalankan tugas.
Orientasi politik	Sikap warga terhadap objek politik yang terdiri atas dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif.
Partisipasi politik	Kegiatan warga yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
Patronase	Pemberian jabatan atau sumber daya kepada pendukung sebagai imbalan dukungan politik.
Perilaku politik	Tindakan individu atau kelompok yang berkaitan dengan pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.
Policy brief	Ringkasan kebijakan maksimal empat halaman yang disiapkan untuk pemangku kepentingan non-akademik.
Politik anggaran	Dinamika kepentingan aktor dalam siklus perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Politik identitas	Penggunaan kesamaan identitas sebagai dasar mobilisasi dukungan, klaim hak, atau perumusan kebijakan.
Politisasi birokrasi	Keadaan ketika pertimbangan politik menggantikan kompetensi dan kinerja dalam pengelolaan aparatur.
Pola interaksi transaksional	Hubungan eksekutif-legislatif yang dibangun atas pertukaran dukungan dengan alokasi program, jabatan, atau proyek.
Sistem merit	Pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar politik.
Sistem politik	Keseluruhan interaksi yang mengalokasikan nilai secara otoritatif: input, konversi, output, dan umpan balik (Easton).
Sosialisasi politik	Proses seseorang memperoleh dan menginternalisasi orientasi politiknya.

Istilah	Pengertian
Triangulasi	Pemeriksaan klaim melalui dua atau lebih sumber yang independen.
Masyarakat sipil	Organisasi warga yang mandiri dari negara dan pasar, berperan sebagai penyeimbang kekuasaan.
Warga kritis	Warga yang kepercayaannya pada lembaga rendah tetapi tetap aktif melalui partisipasi berbasis isu (Norris).

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Utama

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Lane, R. E. (1959). *Political Life: Why People Get Involved in Politics*. Free Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Rush, M., & Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.

Pustaka Pendukung

- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Risiko Korupsi*. KPK RI.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rujukan Tambahan (Rencana Tugas)

- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
- Grindle, M. S. (2012). *Jobs for the Boys: Patronage and the State in Comparative Perspective*. Harvard University Press.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Lasswell, H. D. (1958). *Politics: Who Gets What, When, How*. Meridian Books.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Doubleday.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- Nordlinger, E. A. (1981). *On the Autonomy of the Democratic State*. Harvard University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Milbrath, L. W. (1965). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Rand McNally.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN 1

Formulir Proposal Kasus (maksimal 3 halaman, Minggu 4)

Nama kelompok dan anggota	
Kasus pemerintahan daerah/desa di KTI	
Justifikasi pemilihan kasus	
Pertanyaan analisis	
Rencana pengumpulan data (sumber dan cara verifikasi)	
Persetujuan dosen	

LAMPIRAN 2

Templat Matriks Aktor

Aktor	Jabatan atau peran	Kewenangan formal	Kepentingan	Posisi pada kasus	Bukti dan sumber

LAMPIRAN 3

Templat Lembar Observasi Agen Sosialisasi

Agen	Pesan politik yang disampaikan	Mekanisme	Bukti dan sumber	Pengaruh pada orientasi

LAMPIRAN 4

Templat Kerangka Analisis Pemangku Kepentingan

Aktor	Tipe	Kepentingan	Sumber daya	Strategi	Pengaruh	Bukti

LAMPIRAN 5

Templat Matriks Evaluasi Politisasi Birokrasi dan Politik Anggaran

Aspek	Norma pembandingan	Praktik yang ditemukan	Bukti dan sumber	Dampak pada layanan
Pengisian jabatan				
Mutasi dan promosi				
Perencanaan dan penganggaran				
Pengadaan				
Hibah dan bansos				

LAMPIRAN 6

Templat Kerangka Analisis Kebijakan dan Matriks Rekomendasi

Rumusan masalah	
Analisis penyebab (pohon masalah)	
Tujuan kebijakan (SMART)	
Opsi kebijakan dan kriteria penilaian	
Dimensi SDM aparatur	
Dimensi pelayanan publik	

Rekomendasi	Pelaksana	Dasar hukum	Waktu	Sumber dana	Indikator	Risiko dan mitigasi

LAMPIRAN 7

Templat Policy Brief (maksimal 4 halaman)

Judul	
Ringkasan eksekutif (± 150 kata)	
Konteks masalah	
Bukti utama (dua sampai empat temuan beserta sumber)	
Opsi dan rekomendasi	
Langkah lanjutan dan kontak	

LAMPIRAN 8

Lembar Konsultasi Kemajuan (Minggu 8 dan Minggu 12)

Tanggal	Tahap dan dokumen yang dikonsultasikan	Catatan dosen	Tindak lanjut kelompok	Tanda tangan dosen

LAMPIRAN 9

Log Kontribusi Individu

Nama anggota	NIM	Peran dan bagian yang dikerjakan	Persentase kontribusi	Tanda tangan

LAMPIRAN 10

Lembar Peer Review Kelompok Pembahas

Kelompok penyaji	
Kelompok pembahas	

Pertanyaan pembahas	Catatan dan saran perbaikan
Apakah klaim didukung bukti yang cukup?	
Apakah kerangka teoretis dipakai secara tepat?	
Apakah rekomendasi berada dalam kewenangan pihak yang disasar?	
Adakah penjelasan alternatif yang belum dipertimbangkan?	

LAMPIRAN 11

Lembar Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan GenAI

Saya/kami menyatakan bahwa karya berjudul merupakan hasil kerja sendiri. Seluruh sumber telah dikutip sesuai kaidah, data tidak dikarang atau dimanipulasi, dan kerahasiaan data narasumber dijaga sesuai UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

(a) Alat GenAI yang digunakan	
(b) Bagian yang dibantu	
(c) Prompt yang digunakan	
(d) Modifikasi mandiri	
(e) Refleksi atas penggunaan	

☐ Saya/kami tidak menggunakan GenAI dalam karya ini.

Gorontalo, ...

(.....)

NIM

LAMPIRAN 12

Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul

Berilah tanda centang: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4
1	Capaian pembelajaran setiap unit dinyatakan dengan jelas.				
2	Uraian materi mudah dipahami.				
3	Studi kasus relevan dengan konteks pemerintahan daerah dan desa di KTI.				
4	Aktivitas pembelajaran membantu saya mencapai Sub-CPMK.				
5	Latihan dan kunci jawaban membantu saya mengukur penguasaan.				
6	Rubrik penilaian jelas dan adil.				
7	Proyek semester membangun kemampuan analisis kebijakan saya.				
8	Tampilan dan tata letak modul memudahkan belajar.				
9	Nilai ICHSA-N tercermin dalam kegiatan pembelajaran.				
10	Secara keseluruhan, modul ini bermanfaat bagi saya.				

Bagian modul yang paling membantu	
Bagian modul yang perlu diperbaiki	
Saran lain	